

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BALANGAN**

**Jl. A. Yani Km. 3.5 Paringin Selatan**

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami berupaya untuk memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran kinerja secara optimal, agar menjadi representasi yang obyektif mengenai kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024.

Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku Laporan Kinerja ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Demikian, semoga bermanfaat.

Paringin, 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA STATISTIK DAN  
PERSANDIAN  
KAB. BALANGAN



MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM

NIP. 19710823 199303 1 005



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Grafik .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Gambaran Umum SKPD.....	5
1.4.1 Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis Diskominfo.....	10
2.1.1 Visi.....	11
2.1.2 Misi.....	11
2.1.3 Tujuan .....	11
2.1.4 Sasaran.....	12
2.1.5. Strategi.....	13
2.1.6. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	14
2.1.7. Kebijakan Program Tahun 2023 .....	19
2.1.8 Perjanjian Kinerja (PK).....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Akuntabilitas Kinerja Diskominfo.....	26
A. Capaian Kinerja.....	26
B. Analisa Capaian Kinerja.....	27
C. Realisasi Anggaran .....	71
<b>BAB IV KESIMPULAN</b>	
4.1 Kesimpulan.....	86
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja.....	87

# Daftar Tabel

Tabel 2.1	13
Tabel 2.2	13
Tabel 2.3	13
Tabel 2.4	14
Tabel 2.5	15
Tabel 2.6	26
Tabel 2.10	21
Tabel 3.1	26
Tabel 3.2	28
Tabel 3.3	29
Tabel 3.4	30
Tabel 3.5	31
Tabel 3.6	33
Tabel 3.7	33
Tabel 3.8	37
Tabel 3.9	38
Tabel 3.10	39
Tabel 3.11	39
Tabel 3.12	40
Tabel 3.13	41
Tabel 3.14	51
Tabel 3.15	51
Tabel 3.16	52
Tabel 3.17	53
Tabel 3.18	57
Tabel 3.19	59
Tabel 3.20	60
Tabel 3.21	65
Tabel 3.22	66
Tabel 3.23	67
Tabel 3.24	67
Tabel 3.25	71
Tabel 3.26	71

## Daftar Grafik

Grafik 1.....	29
Grafik 2.....	31
Grafik 3.....	32
Grafik 4.....	32
Grafik 5.....	32
Grafik 6.....	33
Grafik 7.....	38
Grafik 8.....	39
Grafik 9.....	40
Grafik 10.....	52
Grafik 11.....	58
Grafik 12.....	58
Grafik 13.....	59
Grafik 14.....	66
Grafik 15.....	67

**Pendahuluan****1.1. LATAR BELAKANG**

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mewujudkan *Good governance*, berlandaskan pada *TAP MPR RI No.XI/MPR/1998* dan *UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan *Good governance* ini diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang menyajikan data dan Informasi mengenai hasil kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban institusional Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD). Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan sebagai unsur staf dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Balangan , dimana dalam

melaksanakan tugas urusan komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan secara langsung bertanggung jawab kepada Bupati Balangan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara teknis dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan tahun 2021-2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan memuat Visi dan Misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya dalam pelaksanaan tersebut memanfaatkan sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja program / kegiatan maupun kinerja keuangan .

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Disamping itu LKjIP juga dipergunakan sebagai bahan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kinerja SKPD dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja tahun–tahun berikutnya.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

### **1.3. TUJUAN**

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah sebagai :

1. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya pada bidang urusan komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian selama Tahun Anggaran 2024;
2. Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada bidang urusan komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian untuk perbaikan di tahun – tahun berikutnya.
3. Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.
4. Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.
5. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

#### 1.4. GAMBARAN UMUM SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan , terdiri dari

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Pengelolaan Dokumentasi, Produksi, Dan Diseminasi Informasi;
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi, Media Dan Kemitraan;
  - c. Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Layanan Informasi Publik
4. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Tata Kelola E-Government ;
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan Aplikasi Dan Interoperabilitas Data;
  - c. Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi Informasi.
5. Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pengumpulan Data Statistik;
  - b. Sub Koordinator Pengolahan Data Statistik Sektoral;
  - c. Sub Koordinator Persandian Dan Keamanan Informasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor : 76 Tahun 2017 dan sekarang digantikan oleh Peraturan Bupati Balangan Nomor: 112 Tahun 2022, tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dimana disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kominfo dan Bidang Statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

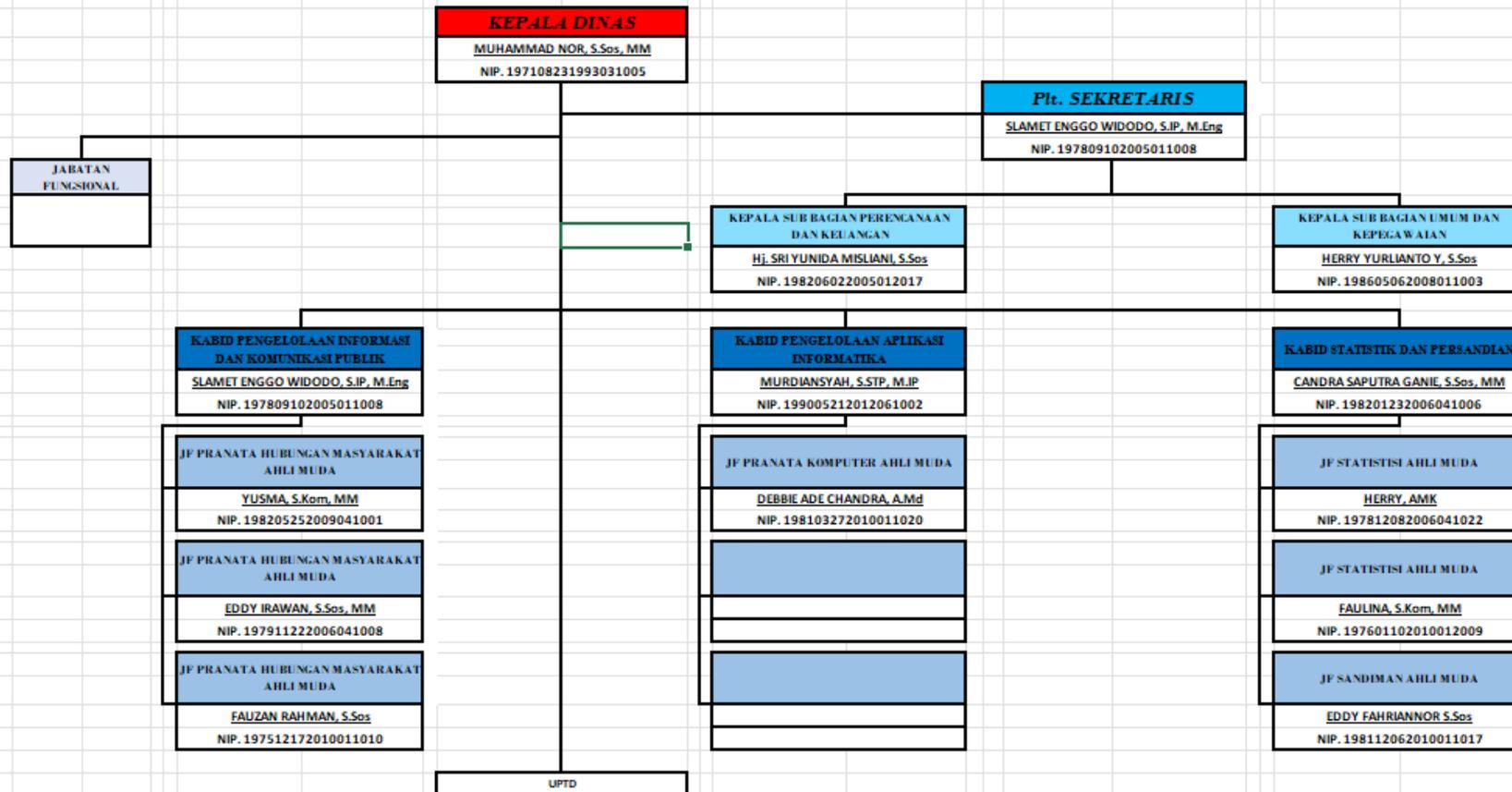
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Di bawah, ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BALANGAN**



#### 1.4.1. Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
SDM DISKOMINFOSAN berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Struktural	2
4.	Jabatan Fungsional	7
5.	Staf	10
6.	PPPK	2
7.	Non PNS	87
<b>JUMLAH</b>		<b>112</b>

Tabel 1.2  
SDM DISKOMINFO berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JABATAN			PRAKOM	STAF	JUMLAH
		Es. II	Es. III	Es. IV			
1.	S-3	-	-	-	-	-	-
2.	S-2	1	3	4	-	5	13
3.	S-1	-	-	4	4	36	44
4.	SM / D-3	-	-	1	1	5	7
5.	D-2 & D-1	-	-	-	-	-	-
6.	SLTA	-	-	-	-	46	46
7.	SLTP	-	-	-	-	1	1
8.	SD	-	-	-	-	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>94</b>	<b>112</b>

Tabel 1.3  
**SDM DISKOMINFOSAN berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>NO</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Laki-Laki	62
2.	Perempuan	50
<b>JUMLAH</b>		<b>112</b>

Dukungan sarana dan prasarana Diskominfo adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor : 1 Gedung Diskominfo
2. Ruang Rapat : 1 Ruang Rapat
3. Mobil Dinas : 7 Mobil Dinas Kominfo
4. Kendaraan Dinas : 25 Unit

## Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan dijabarkan Perbup Nomor 112 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dimana disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD 2021-2026;
2. Renstra Diskominfo 2021-2026;
3. Renja Diskominfo Tahun 2024;
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

## **2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024**

### **2.1.1 VISI**

Berlandaskan Visi Misi Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 menetapkan Visi : “ *Mewujudkan Diskominfo Sebagai Pusat Komunikasi dan Informatika Daerah yang berbasis E-Government*”

Visi tersebut mengandung makna bahwa dengan terwujudnya Diskominfo yang berbasis E-Government akan dapat mendukung kecepatan layanan Masyarakat, barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan stabilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.2. MISI**

Misi yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

#### **1. Meningkatkan Layanan E-Government**

Misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ini bersifat kontributif, artinya terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah. Namun demikian, sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, maka pengelolaan diklat dalam program-program yang dirancang dan dilaksanakan diharapkan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional.

### **2.1.3 TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan sebagaimana penjabaran misi sebagai berikut :

Tabel 2.1  
**Misi – Tujuan**

<b>M I S I</b> Meningkatkan Layanan E-Government
<b>TUJUAN</b> Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas
<b>INDIKATOR TUJUAN</b> Indeks SPBE

#### 2.1.4 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu (1 tahun) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2  
**Tujuan – Sasaran**

<b>Tujuan 1</b> : Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	1. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku

2. Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government	2. Persentase Desa/Wilayah yang Terlayani TIK
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	3. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government
4. Meningkatnya Keamanan Informasi	4. Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan
	5. Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

### 2.1.5 STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tabel 2.3  
**Tujuan, Sasaran, Strategi**

<b>MISI III</b> : Meningkatkan Layanan E-Government		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas	1. Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government Pemerintah.	1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah</li> <li>• Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.</li> <li>• Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</li> </ul>

<b>MISI III</b> : Meningkatkan Layanan E-Government		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>

### 2.1.6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, serta RPJMD tahun 2021-2026. Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang digunakan untuk periode 2021-2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku	0	0	0	0	0	100	100	100
		Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government	Persentase desa yang terlayani TIK	0	0	0	0	0	94	99	100
			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government	0	0	0	0	0	53	53	67

		Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan	0	0	0	0	0	0	100	100
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	0	0	0	0	0	100	200	300

Tabel 2.5  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku	<p>a. <b>Makna</b> Keterbukaan Informasi Publik secara baik, benar dan bertanggungjawab, serta menjadi agen perubahan dalam pelayanan informasi publik yang terbuka</p> <p>b. <b>Alasan Pemilihan</b> Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik</p> <p>c. <b>Perhitungan/Penjelasan</b> Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku / Jumlah seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kab. Balangan X 100 % Kep Menpan No.</p> <p>d. KEP/25/M.PAN/2/ 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyusunan</p>	Kepala Dins Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

			Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )		
2	Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government	Persentase Desa/Wilayah yang Terlayani TIK	<p>a. <b>Makna</b> Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE</p> <p>b. <b>Alasan Pemilihan</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya</p> <p><b>Perhitungan/Penjelasan</b> Jumlah Desa Terpencil yang terlayani TIK / Jumlah Desa Terpencil di lingkup Pemerintah Kab. Balangan X 100 %</p> <p>c.</p> <p>d. Permenpan RB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	Kepala Dins Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informasi
		Persentase Perangkat Daerah dengan Layanan e-Goverment	<p>a. <b>Makna</b> Perangkat Daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE</p> <p>b. <b>Alasan Pemilihan</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan perangkat daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya</p> <p>c. <b>Perhitungan/Penjelasan</b> Jumlah SKPD yang menerapkan E-Government / Jumlah Seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kab. Balangan X 100 %</p>	Kepala Dins Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informasi



			d. <u>Permenpan RB No. 59</u> Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan	<p>a. <b>Makna</b> Data Statistik Sektoral menjadi acuan untuk penyusunan perencanaan di SKPD</p> <p>b. <b>Alasan Pemilihan</b> Memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah</p> <p>c. <b>Perhitungan/Penjelasan</b> Jumlah kebutuhan data seluruh SKPD dibagi jumlah data yang terpenuhi dikalikan 100%</p> <p>d. Peraturan Bupati Balangan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengelolaan data statistik sektoral daerah</p>	Kepala Dins Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bidang Statistik dan Persandian
4	Meningkatnya Keamanan dan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	<p>a. <b>Makna</b> Keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001</p> <p>b. <b>Alasan Pemilihan</b> Pengamanan Layanan Aplikasi dan Perlindungan Data Pribadi</p> <p>c. <b>Perhitungan/Penjelasan</b> Jumlah kasus serangan cyber yang terpulihkan dibagi jumlah kasus serangan cyber yang masuk dikali 100 %</p> <p>d. BSSN Indeks KAMI Versi 4.1</p>	Kepala Dins Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bidang Statistik dan Persandian



### **2.1.7 RENCANA KERJA DAN KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2024**

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas , maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024 adalah meliputi :

1. Menyediakan infrastruktur dan jaringan pendukung e-government
2. Mengintegrasikan semua layanan online SKPD dalam satu wadah yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan layanan.
3. Peningkatan Layanan Informasi Publik.
4. Peningkatan data statistik sektoral yang disajikan secara akurat.

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Angka / Nilai	100 %	100	11,201,400,044	9,884,890,477	88.25	1,316,509,567
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	86,626,600	83,081,500	95.91	3,545,000
	<a href="#">Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</a>	6 Dokumen	6 Dokumen	100	56,783,600	53,983,500	95.07	2,800,000
	<a href="#">Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</a>	2 Laporan	2 Laporan	100	29,843,000	29,098,000	97.5	745,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	6,150,395,294	4,942,515,649	80.36	1,207,879,645
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang	12 Orang	100	6,150,395,294	4,942,515,649	80.36	1,207,879,645
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	343,536,000	331,500,000	96.5	12,026,000
	<a href="#">Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</a>	1 Paket	1 Paket	100	168,526,000	162,400,000	96.36	6,126,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang	100	175,000,000	169,100,000	96.63	5,900,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	3,071,585,700	3,057,497,545		14,088,155
	<a href="#">Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</a>	1 Paket	1 Paket	100	18,000,600	18,000,600	100	0

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
		<a href="#">Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</a>	10 Paket	10 Paket	100	1,528,784,700	1,514,874,200	99.09	13,937,500
		<a href="#">Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</a>	1 Paket	1 Paket	100	25,605,400	25,601,500	99.98	3,900
		<a href="#">Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</a>	3 Dokumen	3 Douemn	100	18,720,000	18,704,000	99.91	16,000
		<a href="#">Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</a>	12Laporan	12Laporan	100	1,480,475,000	1,480,334,245	99.99	130,755
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	100 %	100	351,000,000	329,000,000	93.73	22,000,000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	0 Unit	0	0	0		0
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	1 Unit	100	351,000,000	329,000,000	93.73	22,000,000
		Pengadaan Mebel	0 Unit	0 Unit	0	0	0		0
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	0 Unit	0	0	0		0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	0 Unit	0	0	0		0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 %	100	810,487, 200	759,223,359	93.67	51,809,841

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
		<a href="#">Penyediaan Jasa Surat Menyurat</a>	12 Layanan	12 Layanan	100	141,600,000	136,389,500	96.32	5,210,500
		<a href="#">Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</a>	12 Laporan	12 Laporan	100	95,393,000	86,221,631	90.39	9,171,369
		<a href="#">Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</a>	12 Laporan	12 Laporan	100	573,494,200	536,612,228	93.57	36,881,972
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 %	100	387,779,250	382,072,424	98.53	5,706,826
		<a href="#">Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</a>	0 Unit	0 Unit	0	0	0		0
		<a href="#">Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</a>	31 Unit	31 Unit	100	387,779,250	382,072,424	98.53	5,706,826
		<a href="#">Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</a>	0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	0
B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		60 Persen	60 %	100	14,357,591,600	11,876,707,884	82.72	2,481,243,716
8	Pegelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	100 %	100	14,357,591,600	11,876,707,884	82.72	2,481,243,716

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
		<a href="#">Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</a>	12 Dokumen	12 Dokumen	100	167,465,100	167,348,591	99.93	116,509
		<a href="#">Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</a>	12 Dokumen	12 Dokumen	100	219,350,000	216,415,000	98.66	2,935,000
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	100	263,840,000	260,219,177	98.63	3,620,823
		Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	100	108,520,000	107,270,684	98.85	1,249,316
		Layanan Hubungan Media	59 Dokumen	59 Dokumen	100	13,192,811,000	10,745,948,628	81.45	2,446,862,327
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100	248,345,500	236,107,394	95.07	12,238,106
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100	157,260,000	143,398,410	91.19	13,861,590
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		83 Persen	83 %	100	12,338,515,352	10,957,072,657	88.8	1,381,442,695
	9	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67 Persen	67 %	100	1,278,135,500	1,231,386,975	96.34	1,381,442,695
		<a href="#">Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</a>	20 Unit	20 Unit	100	1,278,135,500	1.231,386,975	96.34	46,748,525

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	1	1	100	579,500,000	390,130,000	67.32	189,370,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1	1	100	10,480,879,852	9,335,555,682	89.07	1,145,324,170
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	0	0	0	0	0	0	0
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		100 Persen	100 %	100	394,975,900	350,392,846	88.71	44,583,054
	10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 %	100	394,975,900	350,392,846	88.71	44,583,054
		Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	3 Dokumen	100	185, 826,000	163,552,000	88.01	22,274,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	10 Dokumen	10 Dokumen	100	142,285,900	126,354,200	88.8	15,931,700
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100	66,864,000	60,486,646	90.46	6,377,354
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		100 Nilai	100 Nilai	100	194,218,000	141,408,000	72.81	52,810,00
	11	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 %	100	194,218,000	141,408,000	72.81	52,810,00
		<a href="#">Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</a>	12 Laporan	12 Laporan	100	194,218,000	141,408,000	72.81	52,810,00
JUMLAH						38,486,700,896	33,210,471,864		5,276,229,032

Keterangan:

	Program
	Kegiatan
	Sub Kegiatan

### 2.1.8. PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6

#### Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan yang berlaku	100%
2.	Meningkatnya akses layanan TIK dan e-government	Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	67%
3.	Meningkatnya pemanfaatan data sektoral	Persentase data sektoral yang dimanfaatkan	100%
4.	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	300

**3.1 AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;
- Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.

**A. CAPAIAN KINERJA**

**Tabel 3.1**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Target Akhir RENSTRA	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RENSTRA (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1.	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan yang berlaku	100%	100 %	100 %	100 %	100/100 %	100	100
2.	Meningkatnya akses layanan TIK dan e-Government	Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK	100%	100%	100 %	95,54%	2,51/100 %	100	100
		Persentase Perangkat Daerah yang	67%	68,75%	102,61 %	56,66%	4,09/100 %	100	102,61

		menerapkan e-Government							
3.	Meningkatnya pemanfaatan data sektoral	Persentase data sektoral yang termanfaatkan	100%	100%	100%	90%	1,99	100	100
4.	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	300	340	113	238	-	500	22,66

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
I	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
II	91% sampai dengan 100%	Berhasil
III	81% sampai dengan 90%	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81%	Kurang Berhasil

## B. ANALISA CAPAIAN KINERJA.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan sangat berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat ) sasaran dan 5 (Lima) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata – rata  $\geq$ .100% dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Visi, Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan untuk masa tahun 2022-2026, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran Starategis I :	
Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	
No	<b>Indikator Kinerja Utama</b>

Indikator Kinerja	1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan yang berlaku
<b>IKU 1</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan yang berlaku</b>	

**a. Realiasi dengan target kinerja tahun 2024.**

Tabel 3.2

Perbandingan realisasi persentase Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan yang **berlaku dengan target kinerja tahun 2024**

<b>Sasaran Starategis I</b>				
<b>Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>1.</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku dengan indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan yang berlaku, targetnya 100% ditahun 2024 ini, realisasinya 100%, sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%. Pencapaian dari target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Komitmen pimpinan serta Kesigapan para operator atau admin dan pemberi kebijakan dalam memberikan laporan tindak lanjut.
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik dan pengaduan masyarakat.
3. Tersedianya sarana dan prasarana informasi seperti website PPID dan SP4N Lapo!.

**b. Perbandingan Capaian Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan yang berlaku dalam beberapa tahun sebelumnya.**

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja, berikut ini disajikan data perkembangan 2 (dua) tahun terakhir pelaksanaan Renstra yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

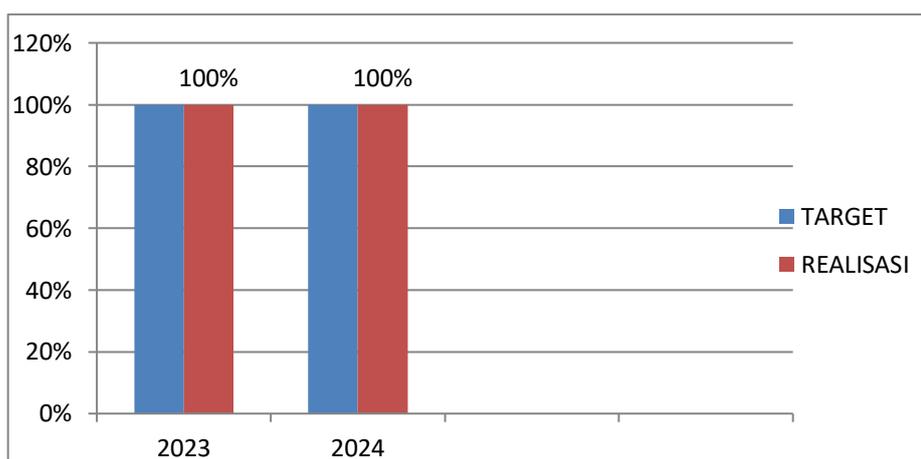
Tabel 3.3

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi dalam beberapa tahun sebelumnya

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2022	N/A	N/A
2023	100%	100%
2024	100%	100%

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 dan 2024 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda.

Grafik 1



Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran pertama sebagai berikut :

**Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku** diperoleh dari Jumlah SKPD yang melaksanakan PPID ( Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Adapun perhitungannya adalah dari Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku dibagi Jumlah Seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kab. Balangan dikalikan 100%.

Dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indikator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah mencapai target yang diharapkan. Rumus Perhitungannya : Sehingga didapat:  $(33/33) \times 100\% = 100\%$

**c. Perbandingan realisasi kinerja kumulatif tahun ini dengan target akhir Renstra**

Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan disusun untuk perencanaan periode 2021 – 2026, sehingga saat ini merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke 4. Adapun capaian realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan target akhir renstra dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target akhir Renstra tahun 2026**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku	100%	100 %	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realiasi kinerja telah mencapai target di tahun 2024. Melihat perkembangan kinerja tiap tahun yang tercapai targetnya, maka target akhir renstra optimis dapat dicapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten Lain, RPJMD Provinsi atau Standar Nasional**

Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar yaitu Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, berbeda dengan indikator Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku sehingga tidak bisa diperbandingkan. Selain itu, Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik, berbeda dengan indikator Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku sehingga tidak bisa diperbandingkan.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten Lain, RPJMD**  
**Provinsi atau Standar Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Kabupaten Balangan</b>				
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku	100 %	100%	100%
<b>Kabupaten Banjar</b>				
2.	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar	100%	100%	100%
<b>Provinsi Kalsel</b>				
3.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90	95,74	95,74

**e. Program dan kegiatan / sub kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja utama**

Pencapaian sasaran ini didukung program dan kegiatan :

**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

**Kegiatan** Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

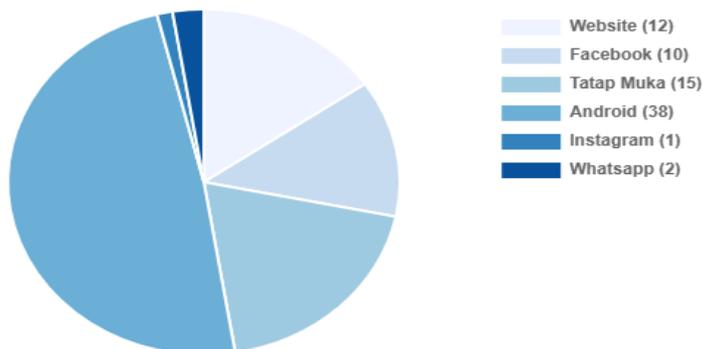
**Sub Kegiatan:**

**1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik**

**REKAP BULAN JANUARI – DESEMBER 2024**  
**Melalui kanal SP4N-Lapor! Pemerintah Kabupaten Balangan**  
**Reporting – Pemerintah Kabupaten Balangan**

**Grafik 2**

- Aduan yang Masuk



Aduan yang tertunda tidak ada, karena semua Aduan dan Aspirasi terdisposisi semua.

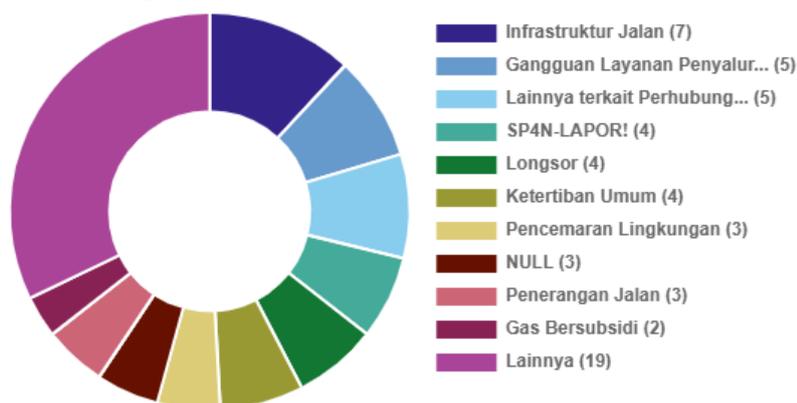
**Grafik 3**

- Aduan yang Terdisposisi



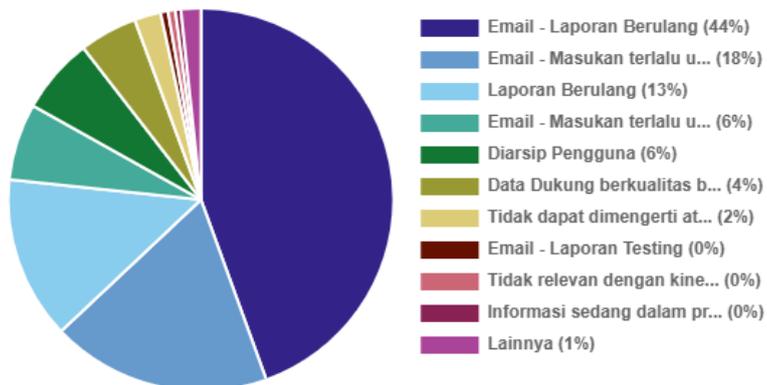
**Grafik 4**

- Kategori Aduan



**Grafik 5**

- Aduan yang di Arsipkan



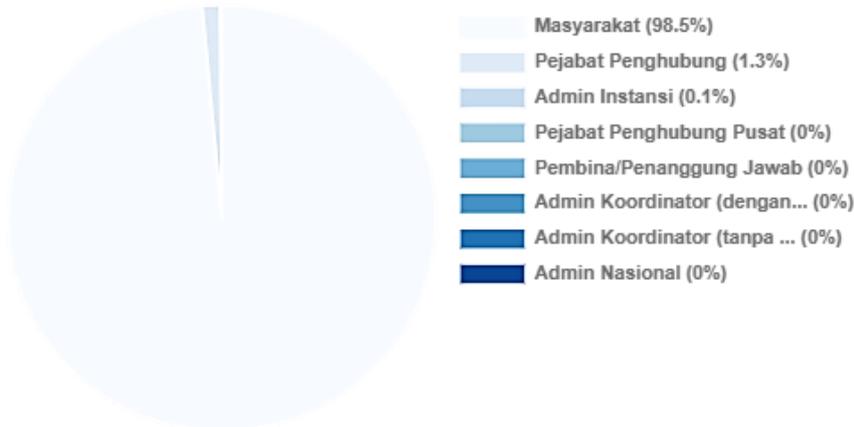
Berdasarkan aduan yang masuk :

1. Persentase "Pengelolaan Laporan Masuk" dengan status "Laporan Terdisposisi" terdiri dari 78 Aduan dan status "Laporan Arsip" Terdiri dari 4 Aduan.

2. Persentase "Klasifikasi Laporan" dengan status "Pengaduan Berkadar Pengawasan" terdiri dari 53 Aduan'
3. Persentase "Laporan Terdiposisi" dengan status "Sedang Diproses" terdiri dari 6 Aduan dan status "Selesai" terdiri dari 67 Aduan.

**Grafik 6**

- Pengguna SP4N Lapor!



Didominasi Masyarakat 98,5%, Admin Penghubung 1,3%, dan Admin Instansi 0,1%.

**TABEL 3.6**  
REKAP LAPORAN TAHUN 2019 – 2024

TAHUN	LAPORAN MASUK	BELUM DITINDAK LANJUTI	PROSES	SELESAI	KETERANGAN
2019	2	0	0	2	
2020	25	0	0	25	
2021	7	0	0	7	
2022	42	0	0	42	
2023	61	0	0	61	
2024	78	1	6	71	
<b>TOTAL</b>	<b>215</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>208</b>	

Berdasarkan dari rekap laporan SP4N Lapor tersebut ada terdapat 78 laporan di tahun 2024, belum ditindaklanjuti 1 laporan, sedang proses 6 laporan dan sudah ditindaklanjuti 71 laporan dari semua aduan yang masuk tersebut.

## 2. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

**TABEL 3.7**  
TABEL PENGGUNA SP4N LAPOR DAN PPIID

NO	NAMA SKPD	SP4N LAPOR	PPID
1	Sekretariat Daerah	.	.
2	Sekretariat DPRD	.	.
3	Inspektorat	.	.
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	.	.
5	Dinas Kesehatan	.	.
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	.	.
7	Satuan Polisi Pamong Paraja	.	.
8	Dinas Sosial	.	.
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	.	.
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	.	.
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	.	.
12	Dinas Perhubungan	.	.
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	.	.
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	.	.
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	.	.
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	.	.
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	.	.
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	.	.
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	.	.
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	.	.
21	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	.	.
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	.	.
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	.	.
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	.	.
25	Kecamatan Paringin Selatan	.	.
26	Kecamatan Paringin	.	.

27	Kecamatan Lampihong	.	.
28	Kecamatan Batumandi	.	.
29	Kecamatan Awayan	.	.
30	Kecamatan Tebing Tinggi	.	.
31	Kecamatan Juai	.	.
32	Kecamatan Halong	.	.
33	BLUD RSUD Datu Kandang Haji	.	.
34	PDAM Balangan	.	.
35	Puskesmas Uren	.	.
36	Puskesmas Halong	.	.
37	Puskesmas Juai	.	.
38	Puskesmas Pirsus	.	.
39	Puskesmas Tebing Tinggi	.	.
40	Puskesmas Awayan	.	.
41	Puskesmas Lok Batu	.	.
42	Puskesmas Batumandi	.	.
43	Puskesmas Lampihong	.	.
44	Puskesmas Tanah Habang	.	.
45	Puskesmas Paringin	.	.
46	Puskesmas Paringin Selatan	.	.

Dari Tabel 3.2 terdapat 33 Instansi yang menggunakan PPID dan 46 Instansi yang menggunakan SP4N Lapor sehingga target dari indikator tersebut mencapai 100 %.

**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.**

Adapun faktor pendukung terlaksananya program ini yaitu adanya komitmen pimpinan, kesigapan para operator atau admin dan pemberi kebijakan dalam memberikan

laporan tindak lanjut, meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik dan pengaduan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana informasi seperti website PPID dan SP4N Lapor!.

Sedangkan faktor Hambatan/Kendala yaitu adanya paradigma bahwa semakin banyak laporan yang ada maka akan mengindikasikan buruknya pelayanan di instansi tersebut, terbatasnya anggaran sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyelenggara layanan, seringnya mutasi pegawai di lingkungan pemda tanpa diikuti dengan proses *transfer knowledge*, masih belum maksimalnya penggunaan aplikasi SP4N LAPOR! karena aplikasi ini masih belum dianggap penting dan strategis oleh masyarakat, eksistensi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengelola informasi publik di Kabupaten Balangan secara umum masih mengalami berbagai kendala sehingga masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyelenggara layanan bukan hanya pada SKPD terkait namun juga menysasar ke tingkat pelayanan dasar seperti puskesmas dan desa secara bertahap baik itu admin PPID maupun admin SP4N Lapor! serta meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan para operator atau admin dan pemberi kebijakan di masing-masing perangkat daerah. PPID Utama melaksanakan koordinasi dengan PPID pelaksana dan membuat daftar informasi publik (DIP), melakukan uji konsekuensi dan pembenahan PPID perangkat daerah serta menysasar desa secara bertahap sebagai pilot project untuk pelaksana PPID serta melakukan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik tingkat Kabupaten Balangan.

## **Kegiatan**

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### **Sub Kegiatan:**

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

<b>Sasaran Starategis II :</b>		
Meningkatnya akses layanan TIK dan e-Government		
	No	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
Indikator Kinerja	2	Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK
	3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-Government
IKU 2	Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK	

**a. Realiasi dengan target kinerja tahun 2024.**

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Starategis Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan khususnya bidang aplikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK

<b>Sasaran Starategis II</b>				
Meningkatnya akses layanan TIK dan e-Government				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK	100 %	100 %	100 %%

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis Meningkatkan akses layanan TIK dan e-Government dengan indikator Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK, targetnya 100% ditahun 2024 ini, realisasinya **100 %**, sehingga capaian dari indikator ini adalah **100 %**. Pencapaian dari target ini dpengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah untuk tetap melaksanakan anggaran Pembangunan Jaringan Koneksi Internet di Desa Blank Spot karena merupakan salah satu indicator Visi Kepala Daerah dalam suksesnya Pembangunan Desa di Kabupaten Balangan.
2. Anggaran yang teralokasikan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan jaringan koneksi internet.

3. Tersedianya SDM yang berkualitas yang mempunyai kapasitas dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan dibantu oleh para Tenaga Ahli IT yang direkrut Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Kominfo Kabupaten Balangan berupaya untuk mencari Solusi terhadap permasalahan tidak tercapainya target kinerja tersebut antara lain sebagai berikut berkoordinasi dengan provider untuk membangun BTS di daerah terpencil.

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya**

Perbandingan realisasi persentase desa/wilayah yang terlayani TIK dengan beberapa tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel dan grafik berikut ini.

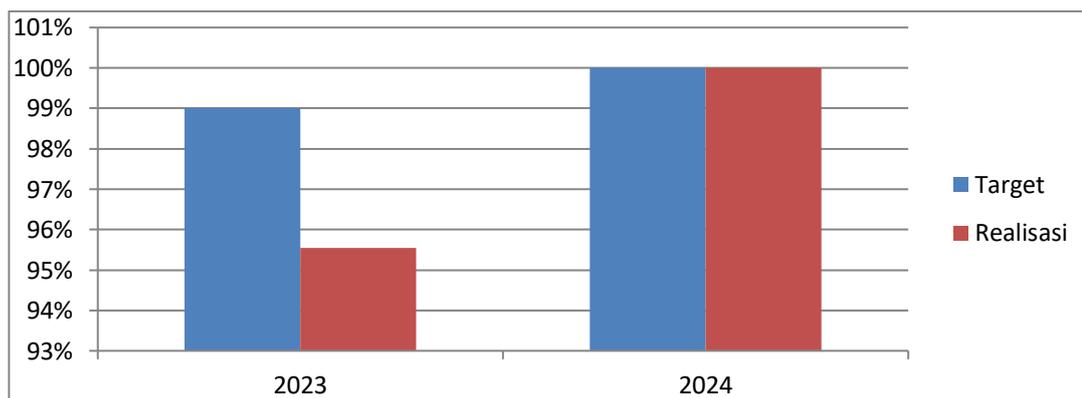
Tabel 3.9

Perbandingan Target dan Realisasi dalam beberapa tahun sebelumnya

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2022	N/A	N/A
2023	99%	95,54%
2024	100%	100 %

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 dan 2024 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda.

Grafik 7



Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis kedua yaitu **'Persentase desa /wilayah yang terlayani TIK'** capaiannya **100%** . Dari target yang ingin di capai di tahun 2024, yaitu 27 Desa Terpencil/blank spot yang terlayani TIK.

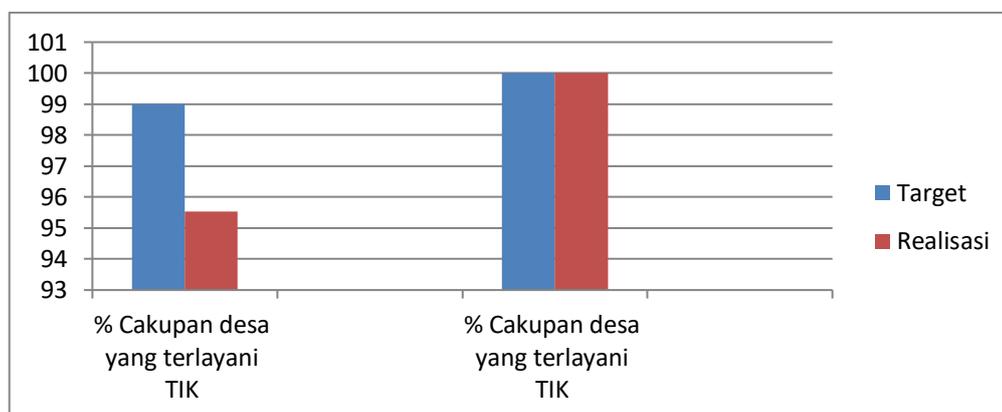
Sehingga realisasi yang didapat sebesar 100 % berdasarkan target kinerja tahun 2024 sebesar 100 % didapat persentase capaian kinerja sebesar 100 %. Secara rinci realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel 3.14 dibawah ini :

Tabel 3.10

**Pencapaian Kinerja desa / wilayah yang terlayani TIK**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
Meningkatnya akses layanan TIK dan e-Government	Persentase Desa / wilayah yang terlayani TIK	100	100 %	100 %

**Grafik 8**

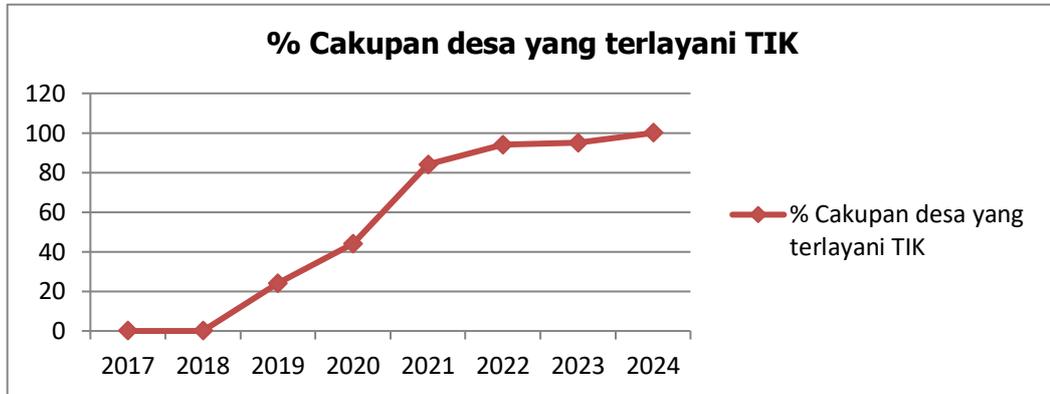


Tabel 3.11

**Perbandingan Realisasi desa / wilayah yang terlayani TIK dari tahun 2018 s/d Th 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase Desa / wilayah yang terlayani TIK	0%	24%	44%	84%	94.27%	95,54	100 %

**Grafik 9**  
**Perbandingan Persentase Desa / wilayah yang Terlayani TIK**  
**Tahun 2018-2024**



Perkembangan realisasi persentase Desa / wilayah yang terlayani TIK 2017 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan hal karena adanya dukungan anggaran dari Kabupaten Balangan.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target akhir tahun renstra**

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan disusun untuk perencanaan periode 2021-2026, sehingga saat ini merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke 4, Adapun capaian realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir tahun renstra tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian
1.	Persentase Desa / wilayah yang terlayani TIK	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja sudah mencapai target tahun 2024, dan sudah mencapai target akhir renstra tahun 2026. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut berkoordinasi dengan provider untuk membangun BTS di daerah terpencil.

**d. Perbandingan realisasi kinerja Kabupaten Balangan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara , Diskominfo Provinsi Kalsel dan RPJM Nasional**

Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten **Kabupaten Hulu Sungai Utara** yaitu Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang berbeda dengan indikator Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yaitu Persentase Desa / wilayah yang terlayani TIK sehingga tidak bisa diperbandingkan. Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian **Provinsi Kalimantan Selatan** yaitu Indeks Domain Tatakelola SPBE Yang berbeda dengan indikator Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yaitu Persentase Desa / wilayah yang terlayani TIK sehingga tidak bisa diperbandingkan. Begitu juga dengan indikator yang digunakan oleh **Kementerian Kominfo** yaitu Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga tidak dapat diperbandingkan juga dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan. Namun objek yang dinilai sama yaitu SPBE yang mencakup juga TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Adapun perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.13**

**Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten Lain, RPJMD Provinsi atau Standar Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Kabupaten Balangan</b>				
1.	Persentase Desa / wilayah yang terlayani TIK	100 %	100 %	100 %
<b>Kabupaten Hulu Sungai Utara</b>				
2.	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,51	2,51	100
<b>Provinsi Kalsel</b>				
3.	Indeks Domain Tatakelola SPBE	2,82	3,63	128
<b>Kementerian Kominfo</b>				
4.	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,75	4,75	100

Pada tabel di atas diketahui bahwa capaian indikator kinerja pada Dinas Kominfo Kabupaten Balangan, Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Dinas Kominfosan Provinsi Kalsel, standar nasional sama-sama mencapai target yang telah ditetapkan. Namun jika diperbandingkan angka realisasi persentase lebih rendah capaian Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan, hal ini karena rumusan indikator yang digunakan berbeda.

**e. Program / kegiatan / sub kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja utama**

**Program** Pengelolaan aplikasi informatika

Sejauh ini untuk mencapai target indikator Persentase Desa / wilayah yang terlayani TIK (%) ada beberapa usaha yang telah dilakukan yaitu :

1. Pembangunan beberapa infrastruktur jaringan internet yang terus dilaksanakan seperti Jaringan Koneksi Internet desa blank spot Yaitu 27 desa terpencil/blank spot yang terlayani TIK sampai dengan tahun 2024 sudah terealisasi sebanyak 27 desa terpencil.
2. Sampai tahun 2024 telah dilakukan pembangunan Jaringan koneksi internet Desa yaitu sebagai berikut :

NO	LOKASI MENARA	TOPOLOGY MENARA	TAHUN PEMBANGUNAN
1	Menara Triangel Desa Binjai Kecamatan Paringin Selatan	Internet	2019
2	Menara Triangel Desa Puyun Kecamatan Halong	Internet	2019
3	Menara Triangel Desa Simpang Bumbuan Kecamatan Tebing Tinggi	Internet	2019
4	Menara Triangel Desa Gunung Riut Kecamatan Halong	Internet sekaligus Pembagi Internet	2019
5	Menara Triangel Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi	Internet	2019
6	Menara Triangel Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi	Internet	2019
7	Menara Triangel Desa Mamigang Kecamatan Halong	Internet sekaligus Pembagi Internet	2020
8	Menara Triangel Desa Uren Kecamatan Halong	Internet sekaligus Pembagi Internet	2020
9	Menara Triangel Desa Binuang Santang Kecamatan Halong	Internet	2020
10	Menara Triangel Desa Marajai Kecamatan Halong	Internet	2020
11	Menara Triangel Desa Kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi	Internet	2020
12	Menara Triangel Desa Mamantang Kecamatan Halong	Internet	2020
13	Menara Triangel Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi	Internet sekaligus Pembagi Internet	2021
14	Menara Triangel Desa Jimamun Kecamatan Lampihong	Internet	2021

15	Menara Triangel Desa Mantuyan Kecamatan Halong	Internet	2021
16	Menara Triangel Desa Mauya Kecamatan Halong	Internet sekaligus Pembagi Internet	2021
17	Menara Triangel Desa Liyu Kecamatan Halong	Internet	2021
18	Menara Triangel Desa Karya Kecamatan Halong	Internet	2021
19	Menara Triangel Desa Tabuan Kecamatan Halong	Internet	2021
20	Menara Triangel Desa Sumber Agung Kecamatan Juai	Internet sekaligus Pembagi Internet	2021
21	Menara Triangel Desa Telaga Purun Kecamatan Paringin Selatan	Internet	2022
22	Menara Triangel Desa Murung Abiun Kecamatan Paringin Selatan	Internet	2022
23	Menara Triangel Desa Tangalin Kecamatan Paringin Selatan	Internet	2023
24	Menara Triangle Desa Hamparaya Kecamatan Batumandi	Internet	2023
25	Menara Triangle Desa Hamarung Kecamatan Juai	Internet	2023
26	Menara Triangle Desa Pamurus Kecamatan Juai	Internet	2023
27	Menara Triangel Desa Terpencil Hampang Kecamatan Halong	Internet	2024
28	Menara Triangel Desa Terpencil Mabulan Desa Padang Raya	Internet	2024
29	Menara Triangle Desa Terpencil Lalayau Kecamatan Juai	Internet	2024
30	Menara Triangel Desa Terpencil Rantau Paku Kecamatan Tebing Tinggi	Internet	2024
31	Menara Triangel Desa Terpencil Ajung Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi	Internet	2024
32	Menara Triangel Desa Terpencil Ampinang Kecamatan Halong	Internet	2024
33	Menara Triangel Desa Terpencil Mapat Kecamatan Halong	Internet	2024
34	Menara Triangel Desa Kalahing Kecamatan Paringin	Internet	2024
35	Menara Triangel Desa Lasung Batu	Internet	2024
36	Menara Internet Desa Terpencil Libaru Sungkai 1 Halong	Internet sekaligus Pembagi Internet	2024
37	Menara Internet Desa Terpencil Libaru Sungkai 2 Halong	Internet	2024
38	Menara Triangel Desa Terpencil Raranum Tebing Tinggi	Internet	2024
39	Menara Triangel Desa Terpencil Panikin Tebing Tinggi	Internet sekaligus Pembagi Internet	2024
40	Menara Triangel Desa Tundakan Bayur Awayan	Internet	2024

3. Dari target 27 Desa, sudah tercover jaringan telekomunikasi yang terlayani TIK.
4. Pada tahun 2024 kominfo Kabupaten balangan juga mendapatkan 4 BTS dari Provider yaitu Desa Awayan Hilir Kecamatan Awayan, Desa Bakung Kecamatan Batumandi, Desa Karuh Kecamatan Batumandi, Desa Mihu kecamatan Juai;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Teknologi Informasi

- Pemeliharaan Jaringan Internet
- Pemeliharaan Perbaikan Menara Hotspot dan perlengkapannya

**Kegiatan** Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota.

**Sub Kegiatan** penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.

**Sub kegiatan** Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**Sub kegiatan** Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

**f. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan dan alternatif Solusi yang akan dilakukan Upaya yang dilakukan RPJMD 2021-2026.**

**Faktor-faktor yang mendukung Keberhasilan:**

1. Komitmen Kepala Daerah untuk tetap melaksanakan anggaran Pembangunan Jaringan Koneksi Internet di Desa Blank Spot karena merupakan salah satu indikator Visi Kepala Daerah dalam suksesnya Pembangunan Desa di Kabupaten Balangan.
2. Anggaran yang teralokasikan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan jaringan koneksi internet.
3. Tersedianya SDM yang berkualitas yang mempunyai kapasitas dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan dibantu oleh para Tenaga Ahli IT yang direkrut Dinas Komunikasi dan Informatika

**Permasalahan/hambatan:**

1. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan koneksi internet ini adalah waktu yang sangat mendesak, karena adanya perubahan lokasi desa yang baru ditetapkan di APBD 2024 dan hambatan lain juga permasalahan peminjaman lahan Lokasi Pembangunan Menara jaringan internet.
2. Kurangnya Minat Provider untuk membangun didaerah pedesaan atau desa terpencil karena apabila dilihat dari sisi bisnis secara komersial tidak signifikan apabila membangun infrastruktur di wilayah yang berpenduduk jarang.
3. Belum Dilakukannya survey secara menyeluruh untuk mendapatkan data riil ke area pedesaan terpencil sehingga belum dapat dipastikan daerah desa terpencil mana saja yang belum dapat diakses telekomunikasi jaringan internet.

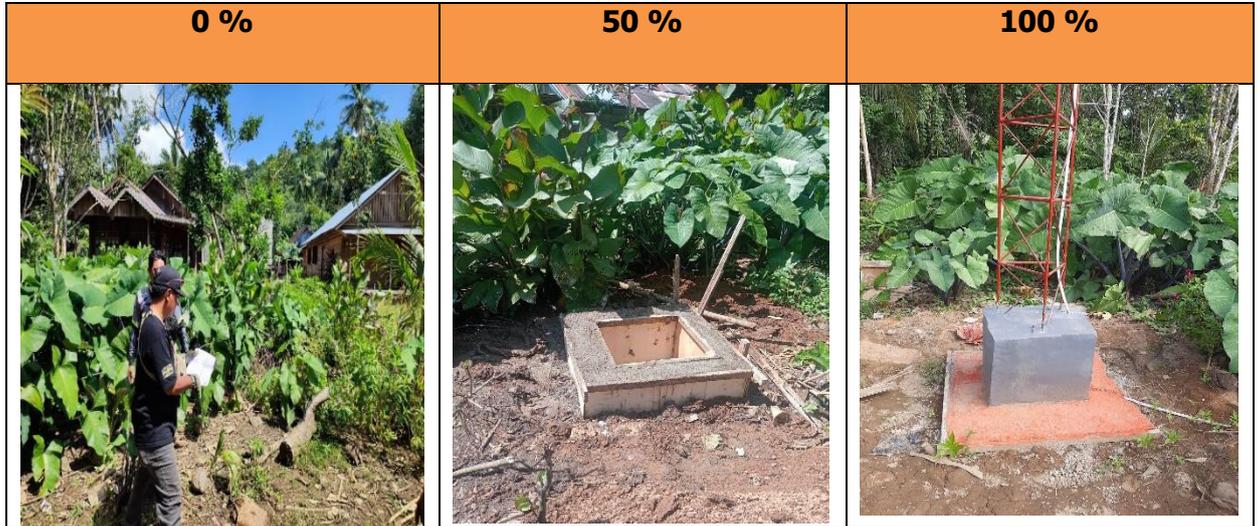
4. kurangnya pengetahuan sebagian warga akan internet, cara kerja internet, cara memanfaatkan internet, dan cara menanggulangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh internet sehingga menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat aspek kontranya ialah warga takut akan dampak negatif internet bagi anak-anak Desa terpencil. Beberapa warga, menganggap internet tidak dibutuhkan di desa, dan sebagian warga menganggap adanya internet mengganggu sinyal yang dikuatkan antenna repeter GSM.
5. Dengan meningkatnya dan bertambahnya koneksi internet yang terhubung dari Diskominfo ke desa-desa secara statistik akan meningkat kerusakan peralatan-peralatan telekomunikasi. Penyebabnya antara lain lonjakan listrik yg tidak teratur, induksi petir dimusim hujan, terpotongnya kabel disebabkan gigitan binatang dan atau disengaja oleh orang yg tidak bertanggung jawab.

**Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:**

1. Melakukan Perencanaan yang matang dan penambahan anggaran untuk membangun infrastruktur dan teknologi informatika.
2. Melakukan survey secara spesifik menggunakan peralatan tertentu dengan didukungnya peralatan seperti gadget yang dikoneksikan dengan minimal 3 operator besar cellular dengan metode drive test.
3. Melakukan Kegiatan sosialisasi pengenalan internet kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat agar mereka mengerti cara menggunakan internet dengan baik dan bijak, serta tidak menggunakan jaringan internet untuk hal-hal yang negatif, pemanfaatan internet kreatif dan positif, dan cara menanggulangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh internet dengan perlunya pendampingan orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet.
4. Mengusulkan Penambahan SDM TIK khususnya tenaga survey untuk melihat apakah menara dan peralatan jaringan internet masih dapat digunakan dan tidak mengalami kerusakan.
5. Dengan menambahkan biaya untuk pemeliharaan peralatan. Mengkoordinir dengan memanfaatkan group komunikasi (WA, Telegram) berupa pengiriman info & pemecahan permasalahannya sehingga terlayani dengan cepat. Contoh group tersebut adalah membuat layanan Helpdesk antar SKPD, Kecamatan & Desa.
6. Membangun Jaringan Fiber Optik dan Menara SST untuk desa dan SKPD.

**FOTO-FOTO KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM PENCAPAIAN TARGET  
2024**

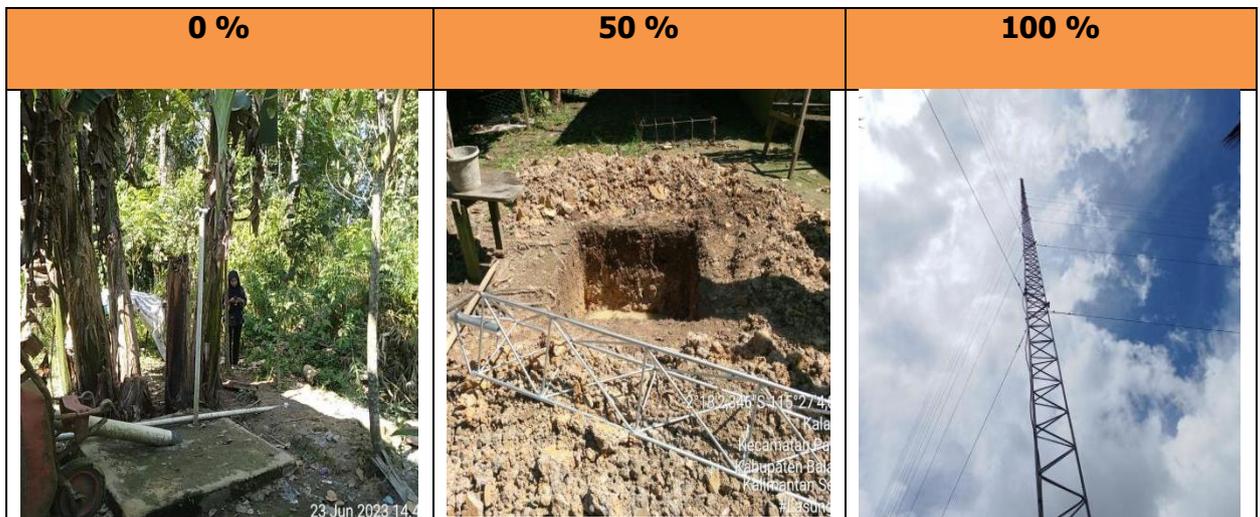
**1. Menara Internet Desa Terpencil Ajung (Kecamatan Tebing Tinggi)**



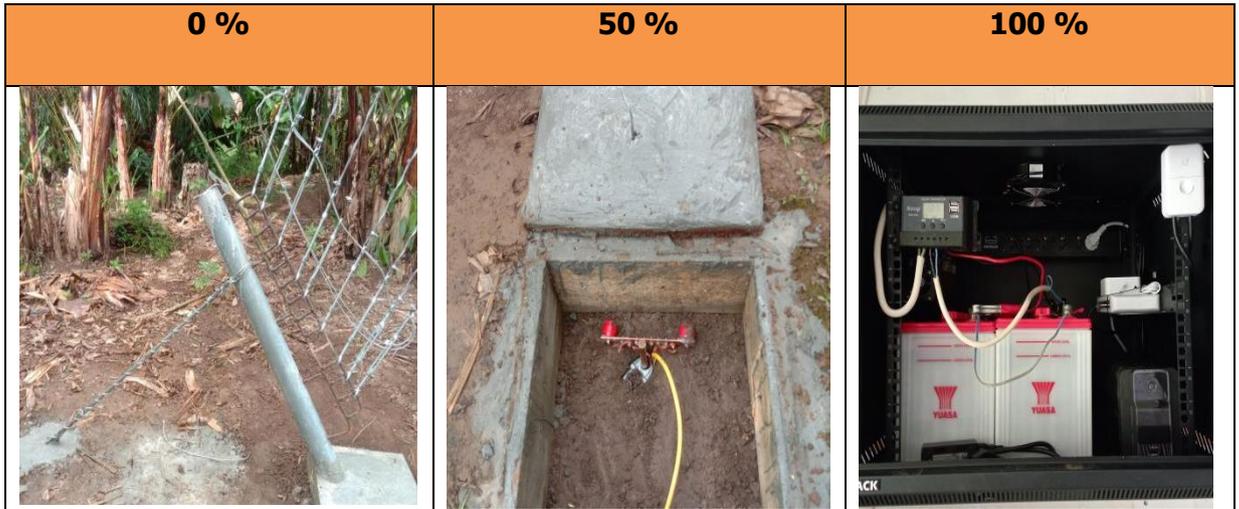
**2. Menara Internet Desa Kalahiang (Kecamatan Paringin)**



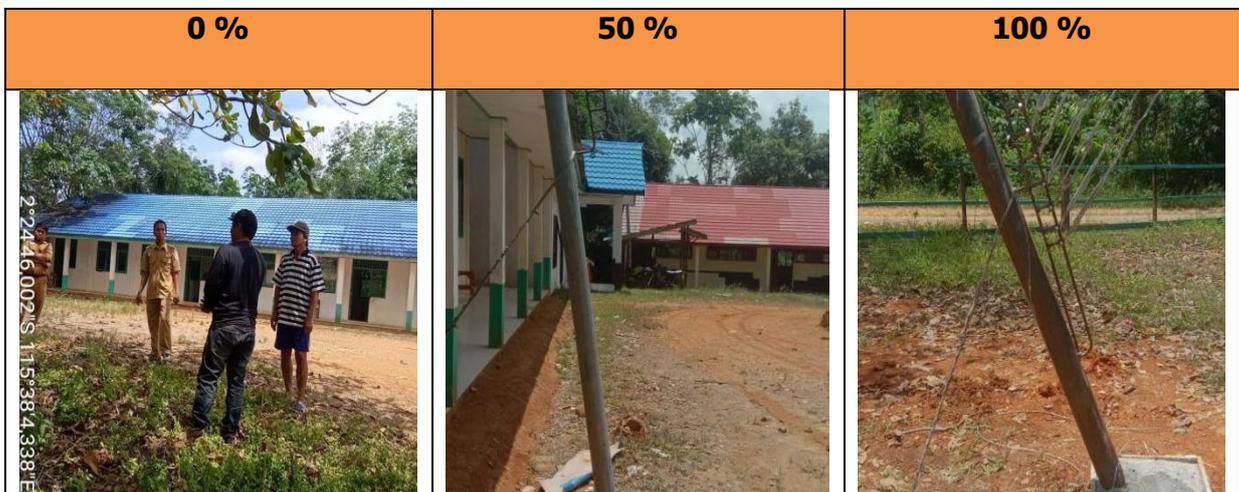
**3. Menara Internet Desa Lasung Batu (Kecamatan Paringin)**



**4. Menara Internet Desa Raranum (Kecamatan Tebing Tinggi)**



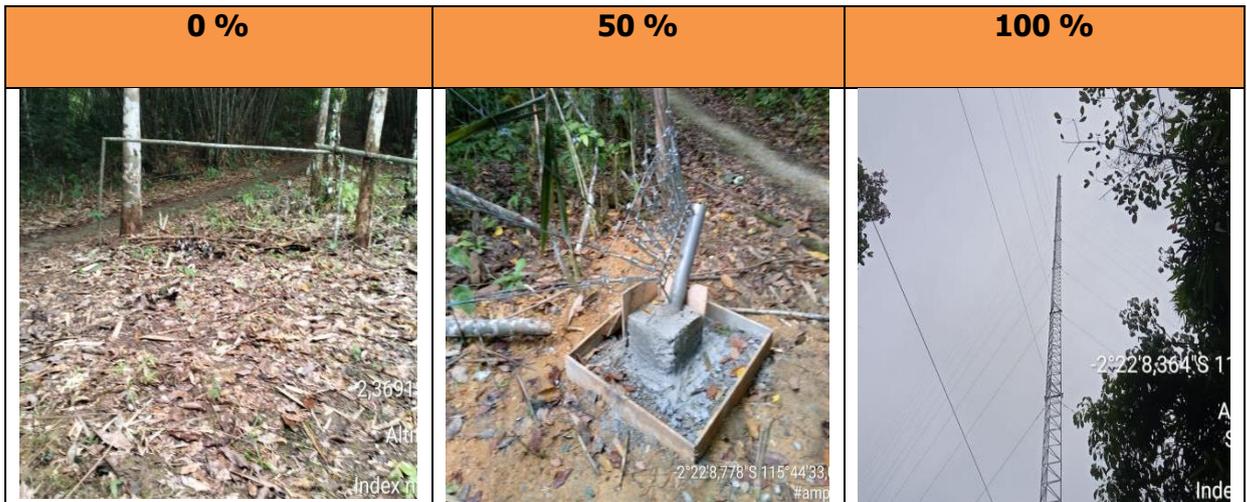
**5. Menara Internet Desa Panikin (Kecamatan Tebing Tinggi)**



**6. Menara Internet Desa Tindakan Bayur (Kecamatan Awayan)**



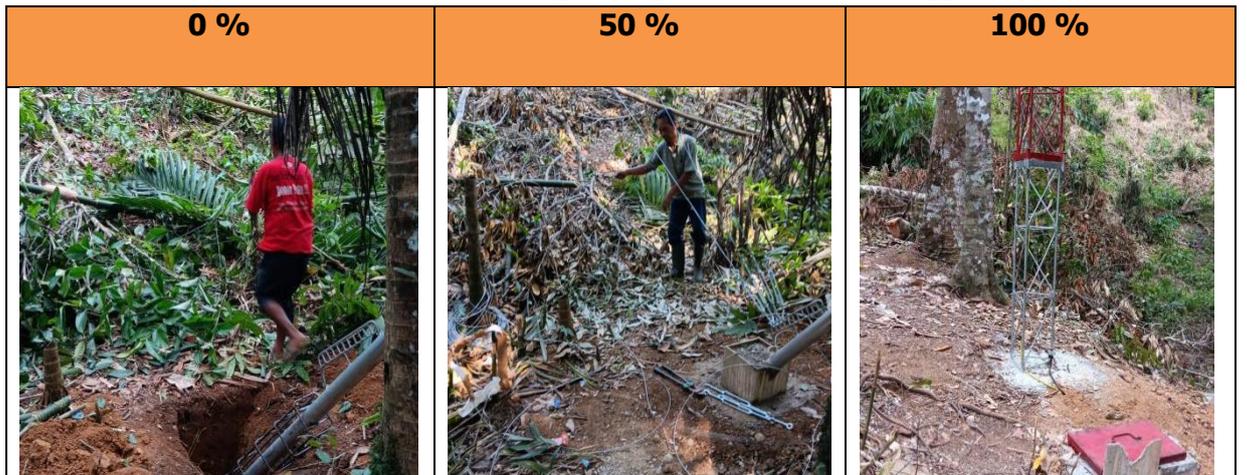
**7. Menara Internet Desa Ampinang (Kecamatan Halong)**



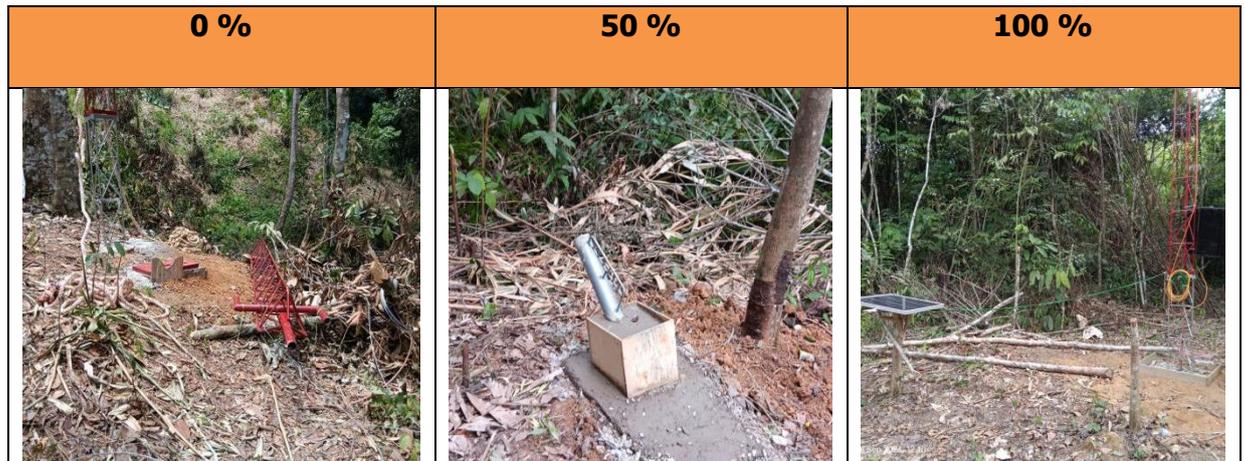
**8. Menara Internet Desa Hampang (Kecamatan Halong)**



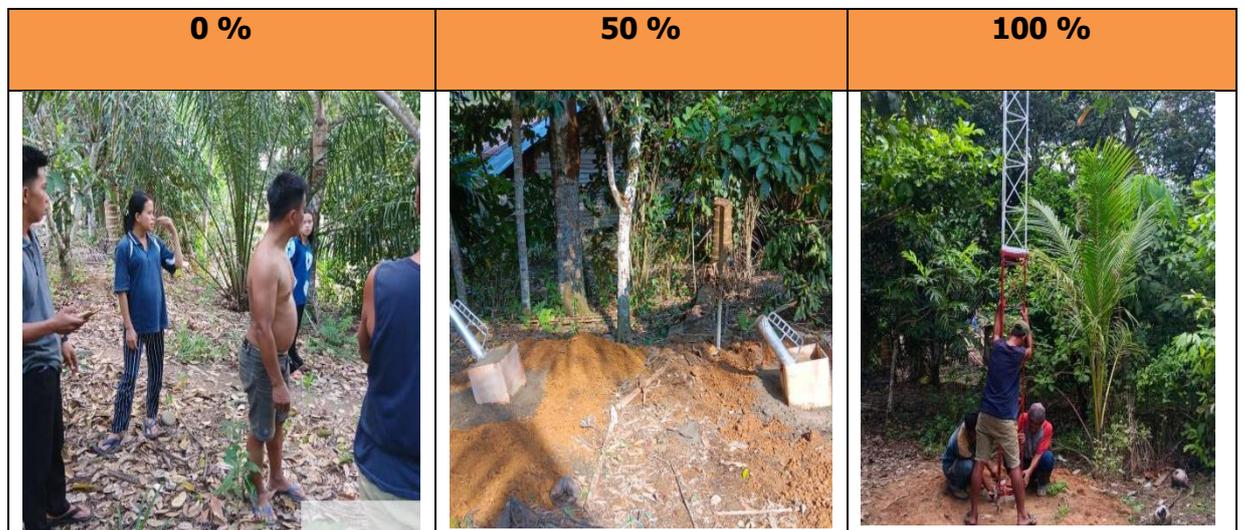
**9. Menara Internet Desa Libaru Sungkai 1 (Kecamatan Halong)**



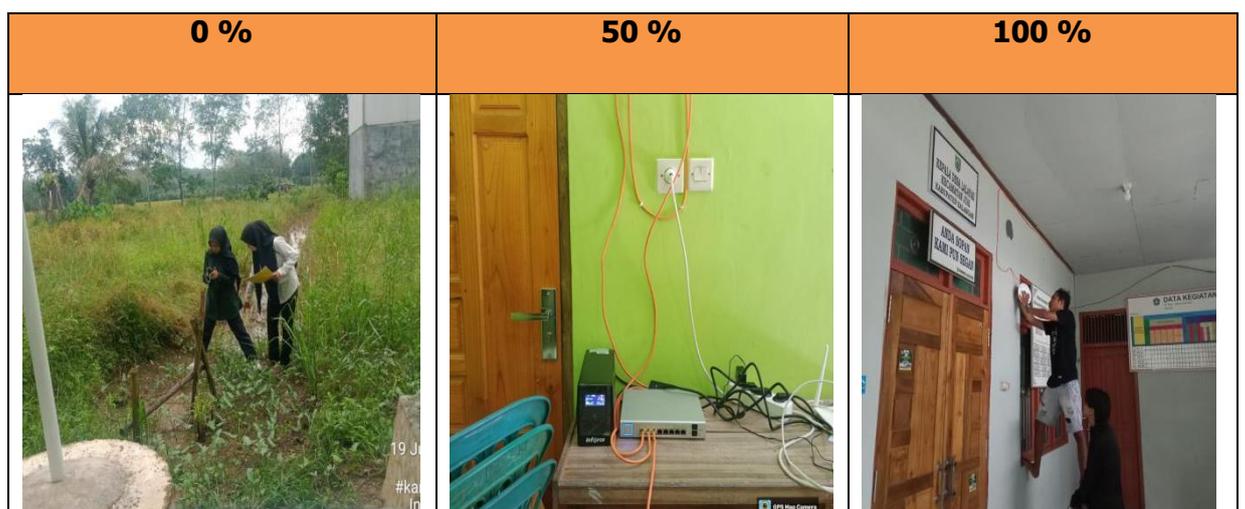
**10. Menara Internet Desa Libaru Sungkai 2 (Kecamatan Halong)**



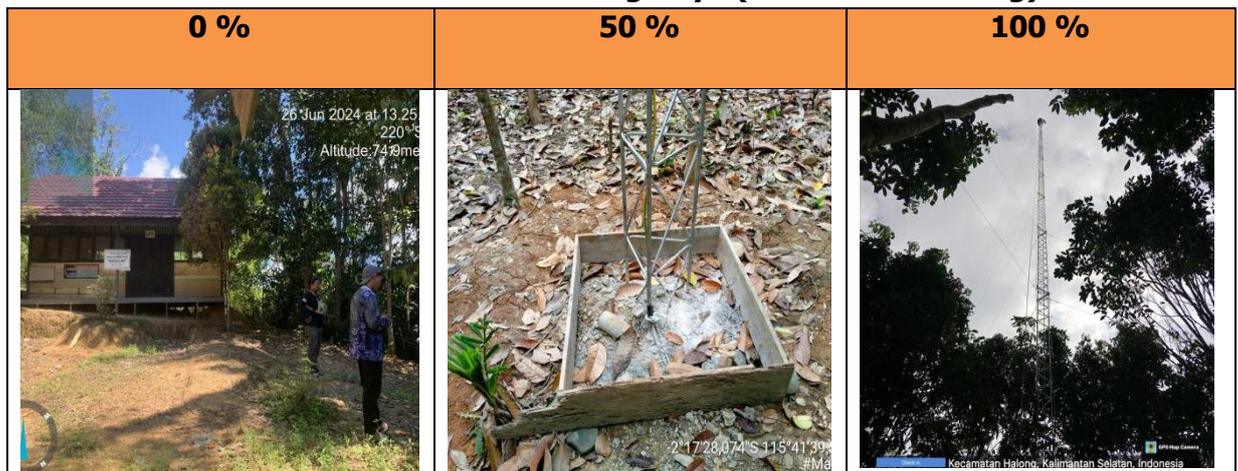
**11. Menara Internet Desa Mapat (Kecamatan Halong)**



**12. Menara Internet Desa Lalayau (Kecamatan Juai)**



### 13. Menara Internet Desa Mabulan Padang Raya (Kecamatan Halong)



### 14. Menara Internet Desa Ranatu Paku (Kecamatan Tebing Tinggi)



Sasaran Strategis II :		
Meningkatnya akses layanan TIK dan e-Goverment		
	No	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
Indikator Kinerja	2	Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK
	3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-Government
<b>IKU 3</b>		<b>Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-Government</b>

#### a. Realisasi kinerja tahun ini dengan target yang ditetapkan

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan tahun 2021 – 2026 capaian kinerja Dinas Kominfosan

Kabupaten Balangan khususnya bidang pengelolaan aplikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.14**

**Realisasi dengan target kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-Government**

<b>Sasaran Starategis II</b>				
Meningkatnya akses layanan TIK dan e-Government				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>1.</b>	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-Government	<b>67 %</b>	<b>68,75 %</b>	<b>102,61 %</b>

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis Meningkatkan akses layanan TIK dan e-Government dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government, targetnya 67 % ditahun 2024 ini, realisasinya **68,75 %**, sehingga capaian dari indikator ini adalah **102,61 %** Pencapaian dari target ini diPengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesadaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yaitu menerapkan beberapa aplikasi yang diterapkan di semua SKPD Kabupaten Balangan. Sampai dengan tahun 2024, dari 32 SKPD yang ada di Kabupaten Balangan, baru 22 SKPD yang terhubung dengan jaringan koneksi internet yang di sediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

**b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya**

Perbandingan realisasi Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Government dengan beberapa tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel dan grafik berikut ini.

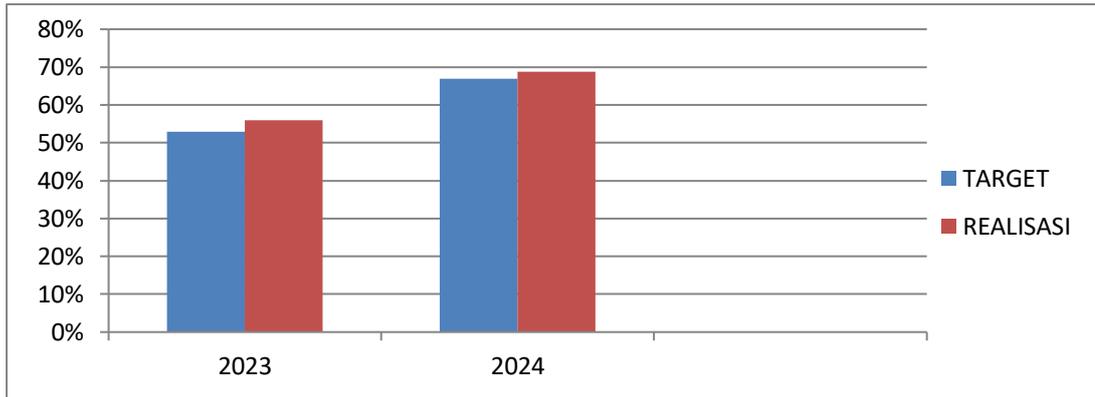
**Tabel 3.15**

**Perbandingan Realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2022	N/A	N/A
2023	53 %	56,66 %
2024	67 %	68,75 %

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 dan 2024 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda.

**Grafik 10**



Pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa perkembangan realisasi persentase **Daerah yang menerapkan e-Government** meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2024 telah tercapai 68,75 %.

Persentase perangkat daerah yang menerapkan E-Government ini dihitung dari jumlah SKPD yang memiliki jaringan koneksi internet yang online dan terhubung dengan aplikasi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun perhitungannya adalah dari 32 SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Balangan baru 22 SKPD yang terhubung.

Namun dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indikator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang diharapkan

**c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan target tahun akhir renstra**

Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Balangan disusun untuk periode tahun 2021 – 2026, maka pada tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke empat. Adapun realisasinya dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16

Perbandingan capaian persentase perangkat daerah yang menerapkan E-Government tahun 2024 terhadap target akhir renstra

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan E-Government	68,75 %	100 %	68,75 %

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 telah mencapai 68,75 % Dan jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra sebesar 100 %, maka capaian kinerja yang terealisasi pada tahun 2024 telah mencapai 68,75 % Dengan memperhatikan perkembangan capaian setiap tahun yang meningkat, maka target pada akhir tahun renstra optimis akan dicapai dengan renstra aksi untuk melaksanakan perangkat daerah yang menerapkan E-Government.

**d. Perbandingan realisasi kinerja Kabupaten Balangan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalsel dan RPJM Nasional**

Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten **Hulu Sungai Selatan** yaitu Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City Yang berbeda dengan indikator Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government sehingga tidak bisa diperbandingkan karena indikator nya yang di ukur berbeda. Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh **Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Selatan** yaitu Persentase OPD Yang Menerapkan E-Government sama dengan indikator Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government, namun capaian yang didapat Diskominfo Kab. Balangan lebih tinggi daripada Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, karena targetnya di tahun 2024 lebih rendah dari target yang Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Begitu juga dengan indikator yang digunakan oleh **Kementerian Kominfo** yaitu Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga tidak dapat diperbandingkan juga dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

Adapun perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten Lain, RPJM Provinsi atau Standar Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Kabupaten Balangan				
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government	67 %	68,75 %	102,61 %

<b>Kabupaten Hulu Sungai Selatan</b>				
2.	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City	4,09	4,09	100 %
Provinsi Kalsel				
3.	Persentase OPD Yang Menerapkan E-Government	88 %	88 %	100 %
Standar Nasional				
4.	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,75	4,75	100 %

Pada tabel di atas diketahui bahwa capaian indikator kinerja pada Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan, Dinas Kominfosan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Kominfosan Provinsi Kalsel, standar nasional sama-sama mencapai target yang telah ditetapkan. Namun jika diperbandingkan angka realisasi persentase lebih tinggi capaian Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan, hal ini karena rumusan indikator yang digunakan berbeda.

**e. Program dan kegiatan serta capaian output dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja utama.**

Penunjang tercapainya indikator Persentase perangkat daerah yang menerapkan E-Government dengan capaian realisasi sebesar 68,75 % yaitu dengan terealisasinya beberapa pekerjaan daerah yang menerapkan E-Government. Adapun rincian penjelasan dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Adapun faktor pendukung terlaksananya program ini yaitu Terasilitasinya dukungan anggaran. Sedangkan faktor Hambatan/Kendala yaitu implementasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten Balangan

Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:

Melaksanakan rapat koordinasi dan komintmen bersama seluruh SKPD dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten Balangan.

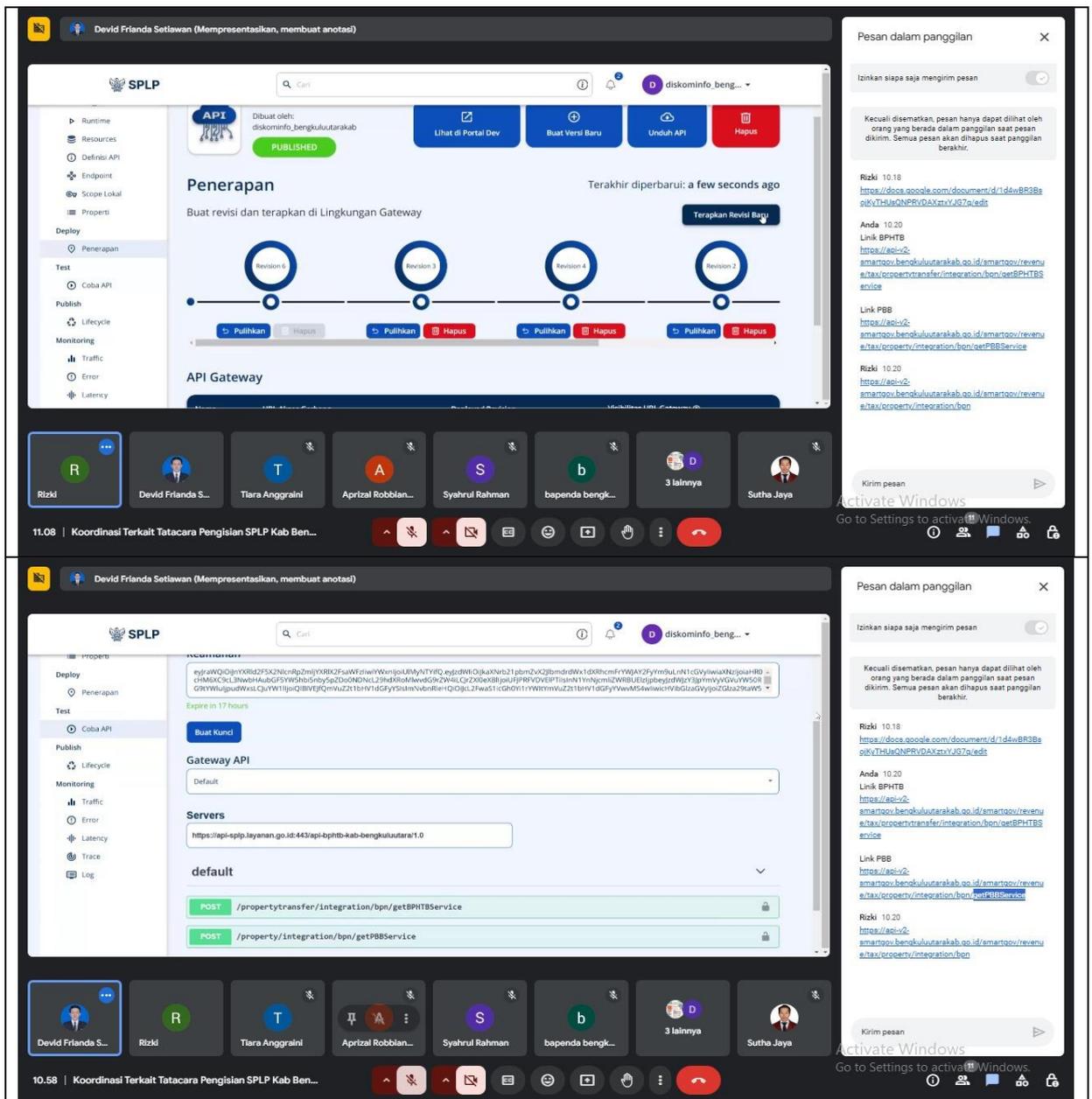
Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

## FOTO-FOTO KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM PENCAPAIAN TARGET 2024



**f. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan dan alternatif Solusi yang akan dilakukan**

**Upaya yang dilakukan RPJMD 2021-2026.**

Untuk sisa capaian akhir RPJMD yaitu 31,25%, pada tahun 2025 akan dilanjutkan di anggaran murni dan perubahan sehingga pada capaian tahun 2025 sisa 10 SKPD semuanya akan tercapai.

**Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan.**

Kenaikan capaian kinerja sebesar **102,61** % hal ini disebabkan oleh kesadaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yaitu diterapkan beberapa aplikasi yang diterapkan di SKPD kabupaten balangan dari 32 SKPD yang menerapkan sampai dengan tahun 2024 ada 22 SKPD yang menerapkan E-Government.

**Permasalahan/hambatan:**

1. Belum diterapkannya secara maksimal pemanfaatan jaringan intra pemerintah dan system penghubung layanan pemerintah
2. Belum terintegrasinya Data Penerapan E-Government di SKPD
3. Kurangnya SDM E-Government yang berbasis TIK, terutama Programmer dan Admin
4. Kurangnya Program dan Aplikasi Penunjang E-Government
5. Belum tersedianya anggaran yang memadai dan terarah.

**Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:**

1. Mendorong aktif SKPD memanfaatkan jaringan intra pemerintah dan system penghubung layanan pemerintah.
2. Peningkatan system pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Balangan.
3. Mengintegrasikan Data TIK SKPD Kabupaten Balangan .
4. Pembuatan Program Aplikasi E-Government baik secara mandiri, dan Kerjasama dengan Pemerintah dan lembaga lainnya dalam hal penerapan E-Gov
5. Menginventarisasi kembali dan update data TIK SKPD Kab. Balangan
6. Membuat perencanaan layanan arsitektur dan peta rencana SPBE agar terarah

<b>Sasaran Starategis III :</b>		
<b>Meningkatnya pemanfaatan data sektoral</b>		
No		Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja	4	<b>Persentase data sektoral yang termanfaatkan</b>
<b>IKU 4</b>	<b>Persentase data sektoral yang termanfaatkan</b>	

Dinas Kominfo merupakan perangkat daerah sebagai penanggung jawab untuk mencapai kinerja sesuai dengan tugas pokoknya. Maka indikator kinerja ini juga menjadi salahsatu indikator kinerja utama dalam Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Balangan

- a. Realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja yang telah ditetapkan**  
**Perbandingan realisasi** Persentase data sektoral yang termanfaatkan dengan target kinerja tahun 2024

**Tabel 3.18**

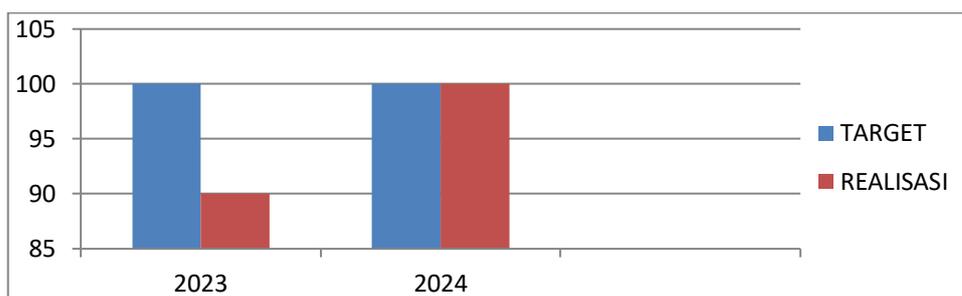
<b>Sasaran Starategis III</b>				
<b>Meningkatnya pemanfaatan data sektoral</b>				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase data sektoral yang termanfaatkan	100 %	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis Meningkatkan pemanfaatan data sektoral dengan indikator Persentase data sektoral yang termanfaatkan, targetnya 100% ditahun 2024 ini, realisasinya 100%, sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%.

Pencapaian dari target ini dipengaruhi oleh faktor antara lain adanya koordinasi dengan Badan Pusat Statistik tentang data sektoral yang diperlukan dan dilakukan survey kemudian diolah Bersama dengan Tim dari BPS Kab. Balangan untuk akhirnya data tersebut bisa dipublikasikan dalam bentuk Buku Statistik Kabupaten Balangan. Selanjutnya juga didukung dengan peningkatan kinerja dan Kerjasama yang baik dengan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Balangan. Selanjutnya juga dilaksanakan pendampingan langsung kepada SKPD lingkup Pemerintah Daerah di Kabupaten Balangan. Kegiatan pendampingan ini, Selain dalam rangka pembinaan terkait pengelolaan data statistik sektoral, hal ini dilaksanakan juga untuk mengetahui kebutuhan data statistik sektoral oleh SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Pendampingan melalui kunjungan langsung ke SKPD ini menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan data SKPD dikarenakan Kabupaten Balangan masih belum ada menetapkan Data prioritas yang merupakan data terpilah yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data Indonesia.

Dari kebutuhan data tersebut, selanjutnya SKPD dan Statistisi selanjutnya mulai mengumpulkan data dan Menyusun dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang diperlukan.



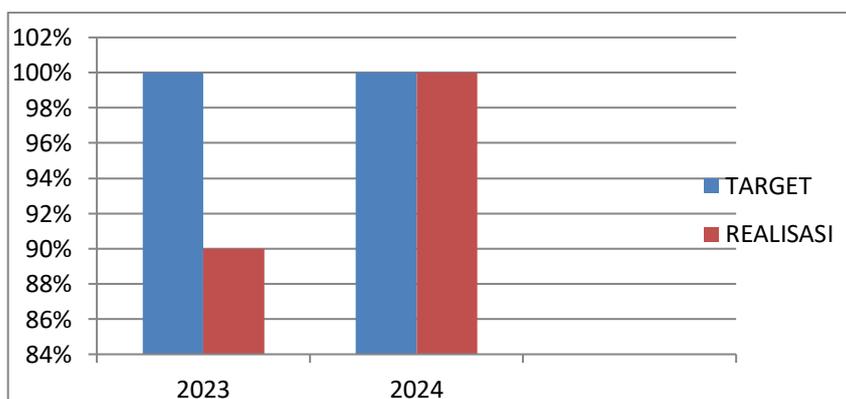
**Grafik 11**

Berdasarkan grafik diatas, untuk sasaran strategis ke tiga yaitu **'Meningkatnya pemanfaatan data sektoral'** "capaiannya 100 % .

Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran ketiga sebagai berikut : Pengumpul dan analisis data dari SKPD yang menjadi target dari data sektoral yang termanfaatkan.

Persentase data sektoral yang termanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihitung dari Jumlah OPD yang menggunakan Data Sektoral dari Diskominfo. Adapun perhitungannya adalah dari Jumlah OPD yang memanfaatkan data sektoral dibagi jumlah seluruh OPD dikalikan 100%. Rumus Perhitungannya : Sehingga didapat:  $(33/33) \times 100\% = 100\%$

**Grafik 12**



**b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun yang lalu**

Persentase data sektoral yang termanfaatkan ada pada sasaran strategis 2021 – 2026, demikian juga halnya pada RPJMD periode 2021 – 2026, namun dengan jumlah Presentase data sektoral yang termanfaatkan yang berbeda targetnya. Hal ini dapat dilihat dari data tahun terakhir pada tabel dan grafik berikut ini

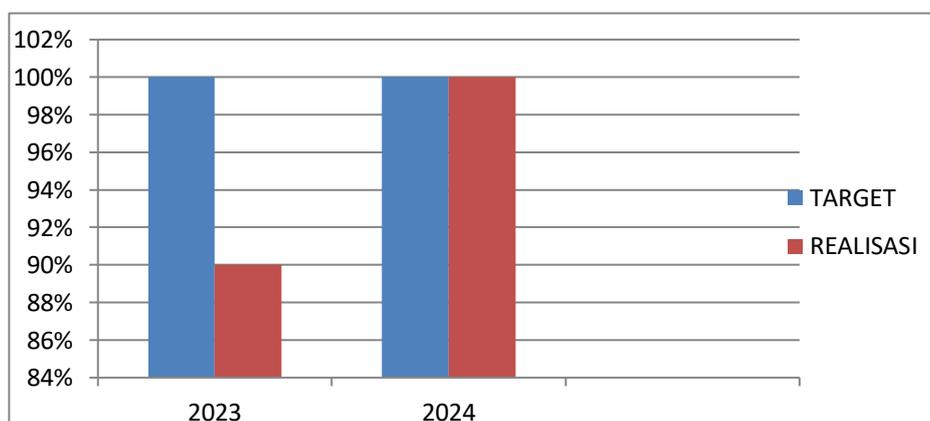
**Tabel 3.19**

**Perbandingan realisasi tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2022	N/A	N/A
2023	100 %	90 %
2024	100 %	100%

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realiasi di tahun 2023 dan 2024 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda. Selanjutnya dengan capaian tahun 2023 dengan capaian 90% untuk tahun selanjutnya sudah dilaksanakan perbaikan dengan jalan melakukan kunjungan langsung ke SKPD sehingga target yang telah ditetapkan bisa meningkat menjadi 100%.

**Grafik 13**



Pada grafik di atas menunjukkan bahwa realisasi data sektoral yang termanfaatkan mengalami peningkatan pada periode renstra dari tahun 2023 sampai 2024 target yang telah ditetapkan meningkat menjadi 100%.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan dibandingkan dengan target kinerja pada akhir renstra tahun 2026**

Pada akhir pelaksanaan renstra di targetkan Persentase data sektoral yang termanfaatkan sebesar 100% . Maka jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 maka capaian terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.20  
Perbandingan realisasi kinerja 2024 terhadap target akhir renstra

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian
1	Persentase data sektoral yang termanfaatkan	100%	100 %	100%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi tahun 2024 telah mencapai target sampai pada akhir renstra.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dengan kabupaten lain, RPJMD Provinsi dan Standar Nasional**

Rumusan indikator kinerja Dinas Kominfosan Kabupaten Hulu Sungai Tengah , RPJMD Provinsi dan Standar Nasional berbeda dengan rumusan indikator kinerja pada Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan namun memiliki kesamaan objek yaitu **Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)**.

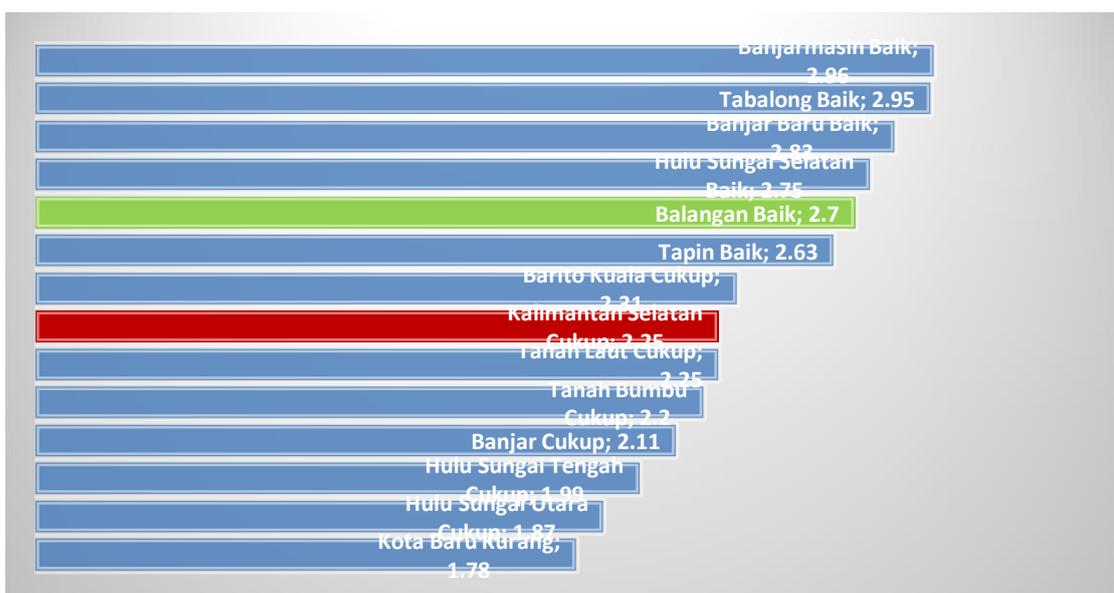
Dalam kacamata nasional, Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral baik di pusat ataupun di daerah pada setiap instansi pemerintah dapat di dilihat dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), yang membagi hasil evaluasi penyelenggaraan statistik kedalam 5 (lima) Predikat sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

No.	Nilai	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Pada tahun 2023, capaian EPSS adalah 1,35 atau dengan predikat 'Kurang'. Pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor : B-698/01000/ES/2024 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2024, capaian EPSS kabupaten Balangan dengan target adalah 1,8 dengan predikat "cukup" adalah 2,70 dengan predikat Baik.

Untuk melihat hasil perbandingan capaian dengan daerah lain, hasil EPSS dapat dilihat pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Provinsi/Kabupaten	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Predikat
Kabupaten Kota Baru	1,78	Kurang
Kabupaten Hulu Sungai Utara	1,87	Cukup
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1,99	Cukup
Kabupaten Banjar	2,11	Cukup
Kabupaten Tanah Bumbu	2,2	Cukup
Provinsi Kalimantan Selatan	2,25	Cukup
Kabupaten Tanah Laut	2,25	Cukup
Kabupaten Barito Kuala	2,31	Cukup
Kabupaten Tapin	2,63	Baik
Kabupaten Balangan	2,7	Baik
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2,75	Baik
Kota Banjar Baru	2,83	Baik
Kabupaten Tabalong	2,95	Baik
Kota Banjarmasin	2,96	Baik



Pada tabel di atas diketahui bahwa capaian indikator kinerja pada Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan, Dinas Kominfosan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dinas Kominfosan Provinsi Kalsel dan standar Nasional sama-sama mencapai target yang telah ditetapkan.

**e. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penunjang tercapainya indikator persentase data sektoral yang termanfaatkan dengan capaian realisasi sebesar 100 % yaitu dengan terealisasinya beberapa pekerjaan data sektoral yang termanfaatkan.

**Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan.**

Capaian sebesar 100% dari indikator yang mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan data statistic sektoral yang bisa dimanfaatkan oleh OPD dalam Menyusun perencanaan pembangunan. Strategi yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik tentang data sektoral yang diperlukan dan perlu dilakukan survey. Berikutnya melakukan survey kepada masyarakat dengan melibatkan tenaga Surveyor yang di rekrut dari anggota masyarakat. Data yang diperoleh dari survey kemudian diolah Bersama dengan Tim dari BPS Kab. Balangan untuk akhirnya data tersebut bisa dipublikasikan dalam bentuk Buku Statistik Kabupaten Balangan.

Selanjutnya, dengan dukungan forum Satu Data Daerah, serta dengan melaksanakan kunjungan langsung ke SKPD selaku produsen data juga turut mendukung dalam memenuhi kebutuhan data yang diperlukan menjadi lebih termanfaatkan.

**Permasalahan/hambatan:**

1. Belum adanya data prioritas daerah yang dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menetapkan kebutuhan data yang harus dipenuhi dalam tahun berjalan;
2. Masih sedikitnya SDM statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Tidak adanya SDM yang bertugas secara khusus dalam pengelolaan dan pengolahan data Statistik Sektoral Pada SKPD selaku Produsen data;
4. Belum optimalnya kinerja Forum Satu Data Daerah;
5. Portal satu Data Kabupaten Balangan, sebagai portal data statistik sektoral di Kabupaten Balangan, masih dalam tahap pengembangan dan belum terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.

**Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:**

1. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan Portal Satu Data Kabupaten Balangan;
2. Melaksanakan Koordinasi dengan Koordinator Data, dan Pembinaan Data di Daerah dalam Menyusun data prioritas daerah, dan juga dalam upaya meningkatkan kinerja dan peran aktif Forum Satu Data Kabupaten dalam upaya mewujudkan Satu Data Indonesia di Kabupaten Balangan;
3. Megusulnkan anggaran untuk meningkatkan kompetensi tenaga Pengelola atau pengolah data SKPD selaku produsen data;
4. Mengusulnkan alokasi anggaran dalam penembangan portal satu data Kabupaten Balangan.

Adapun rincian penjelasan dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**g. Analisis Program / kegiatan / sub kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja utama**

Penunjang tercapainya indikator persentase data sektoral yang termanfaatkan dengan capaian realisasi sebesar 100% yaitu dengan terealisasinya data sektoral yang termanfaatkan.

Pencapaian sasaran ini didukung program, kegiatan dan sub kegiatan :

**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Adapun **faktor pendorong** terlaksananya dari program ini adalah tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peran data dalam upaya peningkatan pelayanan publik, tumbuhnya kesadaran tentang peran Forum Satu Data Kabupaten Balangan dalam upaya mewujudkan Satu Data Indonesia.

**Faktor penghambat** / kendala nya yaitu masih minimnya SDM tenaga Statistisi, Tidak adanya SDM yang bertugas secara khusus dalam pengelolaan dan pengolahan data Statistik Sektoral Pada SKPD selaku Produsen data; Belum optimalnya kinerja Forum Satu Data Daerah; Portal satu Data Kabupaten Balangan, sebagai portal data statistik sektoral di Kabupaten Balangan, masih dalam tahap pengembangan dan belum terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia

Untuk **menyelesaikan permasalahan** tersebut, perlu dilaksanakan koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dalam

mengembangkan Portal Satu Data Kabupaten Balangan; Melaksanakan Koordinasi dengan Koordinator Data, dan Pembinaan Data di Daerah dalam Menyusun data prioritas daerah, dan juga dalam upaya meningkatkan kinerja dan peran aktif Forum Satu Data Kabupaten dalam upaya mewujudkan Satu Data Indonesia di Kabupaten Balangan; Megusulkan anggaran untuk meningkatkan kompetensi tenaga Pengelola atau pengolah data SKPD selaku produsen data; Mengusulkan alokasi anggaran dalam penembangan portal satu data Kabupaten Balangan.

### **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

Adapun **faktor pendorong** terlaksananya dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran bahwa permasalahan data merupakan permasalahan bersama. Selanjutnya juga kesiapsediaan dan kesanggupan tenaga stasisi dalam melakukan pendampingan dalam pengelolaan dan pengolahan data turut menjadi faktor pendorong terselenggaranya kegiatan ini; dan tak bisa dipungkiri pula adalah adanya dukungan program dari Koordinator data daerah (Bapperida Kabupaten Balangan) dan Pembina Data (Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan) turut menjadi faktor pendorong keberhasilan penyelenggaraan kegiatan

**Faktor penghambat / kendala** nya yaitu minimnya tenaga statistisi, tidak adanya petugas khusus pengelola data pada SKPD menjadi kendala klasik dalam menjalankan program ini.

Untuk **menyelesaikan permasalahan** tersebut, maka perlu dilaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan forum satu data Kabupaten, mengusulkan penambahan tenaga statistiik; dan mensosialisasikan teknis pengelolaan data dalam upaya meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dalam pengelolaan data statistic sectoral

#### **Sub Kegiatan:**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- b. Membangun Metadata Statistik Sektoral
- c. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di daerah

Adapun rincian penjelasan dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran Starategis IV :		
Meningkatnya Keamanan Informasi		
	No	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
Indikator Kinerja	5	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
<b>IKU 5</b>	<b>Indeks Keamanan Informasi (KAMI)</b>	

**a. Realiasi dengan target kinerja tahun 2024.**

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan tahun 2021 – 2026 capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan tahun 2021 – 2026 khususnya bidang Statistik dan Persandian (urusan persandian) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21

Perbandingan realisasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dengan target kinerja tahun 2024

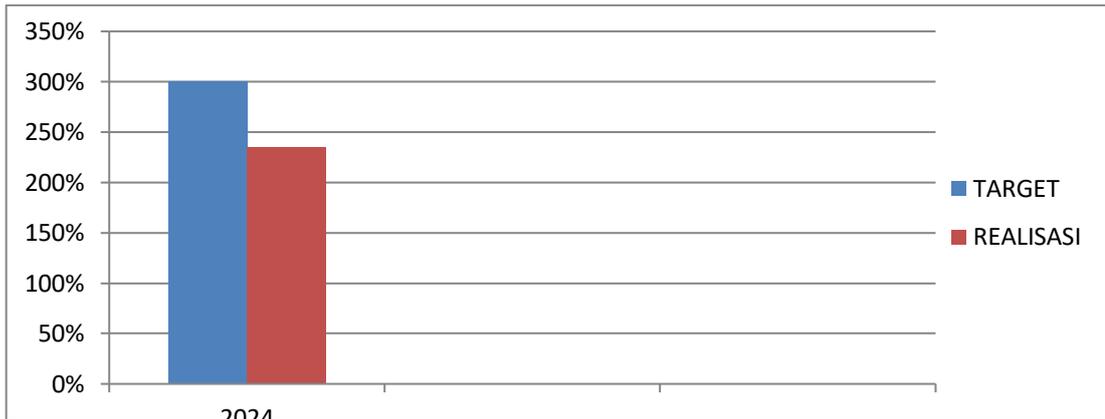
Sasaran Starategis I				
Meningkatnya Keamanan Informasi				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	300	340	113

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis Meningkatkan Keamanan Informasi dengan indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI), targetnya 300% ditahun 2024 ini, realisasinya 340, sehingga capaian dari indikator ini adalah 238%.

Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah dapat dihitung dari capaian Diskominfosan dalam memulihkan kasus-kasus cyber yang menyerang web site OPD di Kabupaten Balangan. Adapun perhitungannya adalah dari Jumlah kasus serangan cyber yang dapat terpulihkan dibagi Jumlah kasus serangan cyber yang menyerang web site OPD di Kabupaten Balangan dikali 100%.

Dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indikator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang diharapkan.

**Grafik 14**



**b. Perbandingan Capaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dalam beberapa tahun sebelumnya.**

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja, berikut ini disajikan data perkembangan 2 (dua) tahun terakhir pelaksanaan Renstra yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

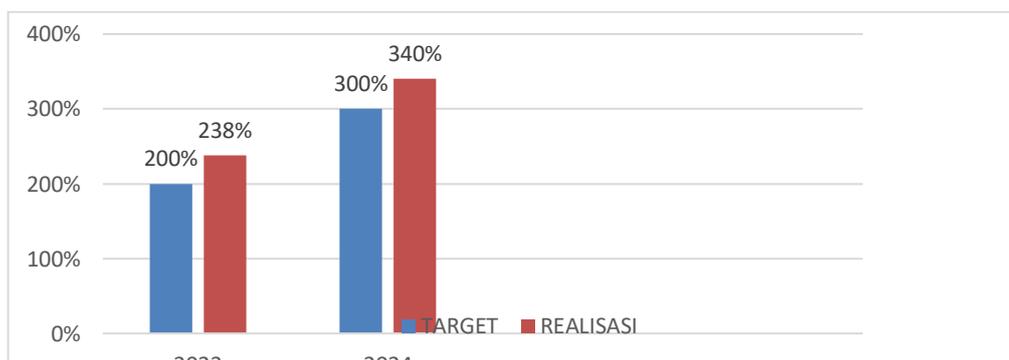
3.22

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi dalam beberapa tahun sebelumnya

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2022	N/A	N/A
2023	200	238
2024	300	340

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 dan 2024 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda.

**Grafik 15**



**c. Perbandingan realisasi kinerja kumulatif tahun ini dengan target akhir Renstra**

Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan disusun untuk perencanaan periode 2021 – 2026, sehingga saat ini merupakan

pelaksanaan Renstra tahun ke 4. Adapun capaian realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan target akhir renstra dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.23**  
**Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target akhir Renstra tahun 2026**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian
1.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	340	500%	113

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realiasi kinerja mencapai target di tahun 2024. Melihat perkembangan kinerja tiap tahun yang tercapai targetnya, maka target akhir renstra optimis dapat dicapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dengan kabupaten lain, RPJMD Provinsi dan Standar Nasional**

Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu persentase pemenuhan standar infrastruktur , teknologi informasi, dan komunikasi (TIK) berbeda dengan indikator dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yaitu Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sehingga tidak bisa dibandingkan. Begitu juga dengan indikator yang digunakan untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu SNI ISO/IEC 27001 sehingga tidak bisa dibandingkan juga dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan yaitu Indeks Keamanan Informasi (KAMI).

**Tabel 3.24**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten Lain, RPJMD Provinsi atau Standar Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Kabupaten Balangan				
1.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	300	340	113
Kabupaten Lain				
2.	-	N/A	N/A	N/A
Provinsi Kalsel				

3.	Persentase pemenuhan standar infrastruktur , teknologi informasi, dan komunikasi (TIK)	100	100	100
4.	Standar Nasional			
	SNI ISO/IEC 27001	N/A	N/A	N/A

Pada tabel di atas diketahui bahwa capaian indikator kinerja pada Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan, Dinas Kominfosan Kabupaten Dinas Kominfosan Provinsi Kalsel, standar nasional sama-sama melebihi target yang telah ditetapkan. Namun jika diperbandingkan angka realisasi persentase lebih tinggi capaian Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan, hal ini karena rumusan indikator yang digunakan berbeda.

**e. Program dan kegiatan / sub kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja utama**

Pencapaian sasaran ini didukung program , kegiatan dan sub kegiatan:

Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

**FOTO KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM PENCAPAIAN TARGET 2024**

**Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Versi 5.0**

Responden:  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan

Jl. A. Yani KM. 3,5 Paringin Selatan

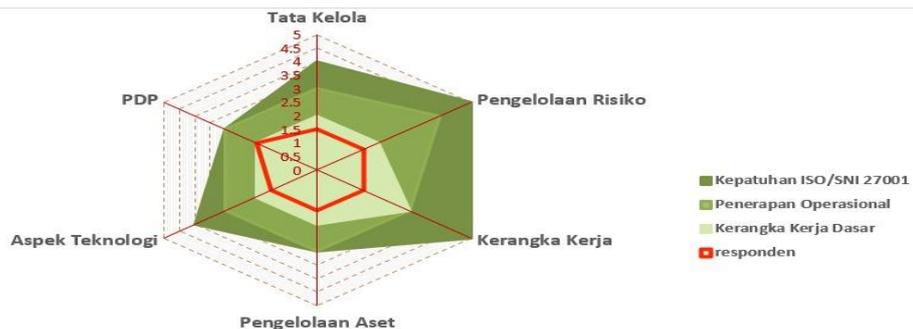
0526-2028434  
user@departemen\_responden.go.id  
09 Januari 2025

Skor Kategori SE : 19 Kategori SE Tinggi

Hasil Evaluasi Akhir: **Tidak Layak**

Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori: 340

Tata Kelola	: 43	T. Kematangan:	I+	I+ s/d II
Pengelolaan Risiko	: 24	T. Kematangan:	I+	
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 41	T. Kematangan:	I+	
Pengelolaan Aset	: 78	T. Kematangan:	I+	
Teknologi dan Keamanan Informasi	: 94	T. Kematangan:	I+	
Pelindungan Data Pribadi	: 60	T. Kematangan:	II	
Pengamanan Keterlibatan P.Ketiga	: 35 %			



**f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Capaian sebesar 100% dari indikator yang mempengaruhi keberhasilan dalam memulihkan kasus-kasus serangan cyber pada web site OPD dan Pemkab Balangan. Strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada pegawai yang menangani kasus serangan cyber agar nantinya bisa mengatasi permasalahan kasus cyber itu.

**Permasalahan/hambatan:**

1. Belum adanya tenaga khusus persandian yang dimiliki Dinas Kominfosan
2. Diperlukan keahlian khusus dalam menangani kasus serangan cyber.
3. Masih minimalnya anggaran untuk kegiatan persandian.

**Solusi/strategi pemecahan masalah ini adalah:**

1. Merekrut tenaga Ahli Persandian untuk menangani kasus cyber di Kabupaten Balangan
2. Memberikan pelatihan atau diklat khusus persandian untuk pegawai di Bidang Persandian
3. Mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kegiatan persandian.

**h. Analisis capaian program, kegiatan / sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja.**

Pencapaian sasaran ini didukung program, kegiatan dan sub kegiatan :

**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Adapun **faktor pendorong** terlaksananya dari program ini adalah

Dalam sistem pemerintahan, persandian memiliki peran yang amat vital dalam mengamankan informasi yang bersifat rahasia agar tidak diketahui pihak lain, terkait keamanan informasi dan siber dalam dunia IT ditujukan untuk pemerintah daerah.

**Faktor penghambat / kendala** nya yaitu

Masih minimnya SDM tenaga Sandiman, Tidak adanya SDM yang bertugas secara khusus dalam menangani serangan Syber sehingga belum optimalnya kinerja bidang persandian Kabupaten Balangan.

Untuk **menyelesaikan permasalahan** tersebut maka perlu

Dilaksanakan Koordinasi serta konsultasi dengan Pemerintah Provinsi terutama Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Selatan serta Badan Siber dan Sandi Negara, Membentuk Tim yang bertanggung jawab untuk menangani insiden keamanan computer yaitu CSIRT yang memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, merespons dan mencegah insiden keamanan siber yang dapat membahayakan organisasi

### **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Adapun **faktor pendorong** terlaksananya dari kegiatan ini adalah

tumbuhnya kesadaran bahwa permasalahan keamanan informasi disuatu perangkat daerah merupakan permasalahan bersama. Selanjutnya juga kesiapsedian dan kesanggupan tenaga ahli persandian dalam melakukan pendampingan dalam pengelolaan dan pengolahan informasi turut menjadi faktor pendorong terselenggaranya kegiatan ini; dan tak bisa dipungkiri pula adalah adanya dukungan program dari Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Selatan serta Pembina teknis persandian yaitu Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan sandi Negara turut menjadi faktor pendorong keberhasilan penyelenggaraan kegiatan.

### **Faktor penghambat / kendala nya yaitu**

masih minimnya SDM tenaga Ahli IT, Tidak adanya SDM yang bertugas secara khusus dalam menangani serangan Syber sehingga belum optimalnya kinerja bidang persandian.

### **Menyelesaikan permasalahan tersebut, maka perlu**

Dilaksanakan Koordinasi serta konsultasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi terutama Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Selatan serta Badan Siber dan Sandi Negara, Mengusulkan penambahan tenaga Sandiman, serta mensosialisasikan teknis keamanan informasi dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang kerawanan berbagai serangan syber yang ada di daerah.

### **Sub Kegiatan:**

#### **Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Elektronik.**

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan system dan transaksi elektronik serta peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah.

### C. REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2024

Disamping penilaian capaian kinerja, penilaian kinerja anggaran juga tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah input menjadi output, atau proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang di anggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian saran dan tujuan. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran didapat dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Total Realisasi Anggaran}}{\text{Total Alokasi Dana}} = \frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Pagu}}$$

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 33.210.471.864 Atau 86,29% dari pagu sebesar Rp. 38.486.700.896 Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-government Rp. 10.957.072.657

Tabel 3.25  
Perbandingan Anggaran dan Realisasi  
Anggaran Dinas Kominfosan 2023 – 2024

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2023	26.727.674.661	23.698.362.187	88,66 %
2024	38.486.700.896	33.210.471.864	86,29%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi anggaran tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, sedangkan pada tahun 2024 ini realisasi capaian menurun karena ada kode rekening dari sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada regulasi mendasar untuk pembayaran Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website yaitu tidak sesuai dengan Perpres Nomor 33 tahun 2020 sehingga berpengaruh terhadap realisasi keuangan yang ada di Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan.

Tabel 3.26  
Realisasi Anggaran program/kegiatan/sub kegiatan

Penunjang pencapaian target kinerja tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi	<b>Program</b> Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	14.357.591.600	11.876.707.884	82,72 %
				14.357.591.600	11.876.707.884	82,72 %
			<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	167.465.100	167.348.591	99,93 %
			<b>Sub kegiatan</b>			
			1. Monitoring opini dan aspirasi publik	219.350.000	216.415.000	98,62 %
			2. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	263.840.000	260.219.177	98,62 %
			3. Pengelolaan media komunikasi publik	108.520.000	107.270.684	98,84 %
			4. Pelayanan informasi publik	13.192.811.000	10.745.948.628	81,45 %
5. Layanan hubungan media	248.345.500	236.107394	95,07 %			
6. Penguatan tata Kelola komisi informasi di daerah	157.260.000	143.398.410	91,18 %			
7. Penyelenggaraan hubungan Masyarakat, media dan kemitraan komunitas						
2	Meningkatnya akses layanan TIK dan Government	Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK	<b>Program</b> Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.338.515.352	10.957.072.657	88,80 %
		Persentase perangkat daerah yang menerapkan e-Government	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	1.278.135.500	1.231.386.975	96,34 %
			<b>Sub kegiatan</b>	1.278.135.500	1.231.386.975	96,34 %
			11.060.379.852	9.725.685.682	87,93 %	

			<p>1. penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah</p> <p><b>Kegiatan</b> Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Sub kegiatan</b></p> <p>1. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>2. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</p>	<p>579.500.000</p> <p>10.480.879.852</p>	<p>390.130.000</p> <p>9.335.555.682</p>	<p>67,32 %</p> <p>89,07 %</p>
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	Persentase data sektoral yang termanfaatkan	<p><b>Program</b></p> <p>Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Sub Kegiatan</b></p> <p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</p> <p>2. Membangun Metadata Statistik Sektoral</p> <p>3. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di daerah</p>	<p>394.975.900</p> <p>394.975.900</p> <p>185.826.000</p> <p>142.285.900</p> <p>66.864.000</p>	<p>350.392.845</p> <p>350.392.845</p> <p>163.552.000</p> <p>126.354.200</p> <p>60.486.646</p>	<p>88,71%</p> <p>88,71%</p> <p>88,01 %</p> <p>88,80 %</p> <p>90,46 %</p>
4.	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	<p><b>Program</b></p> <p>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</p> <p><b>Kegiatan</b></p> <p>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</p>	<p>194.218.000</p> <p>194.218.000</p>	<p>141.408.000</p> <p>141.408.000</p>	<p>72,81 %</p> <p>72,81 %</p>

		Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
		<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	194.218.000	141.408.000	72,81 %

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024**  
**LAPORAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024**  
**DINAS KOMINFOSAN KABUPATEN BALANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi	100 %	82,72 %	<b>Cukup Efisien</b>
2.	Meningkatnya akses layanan TIK dan Government	Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK	100 %	88,80 %	<b>Cukup Efisien</b>
		Persentase perangkat daerah yang menerapkan e-Government	102,61%	88,80 %	<b>Cukup Efisien</b>
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	Persentase data sektoral yang termanfaatkan	100%	88,71%	<b>Cukup Efisien</b>
4.	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	113%	72,81 %	<b>Efisien</b>

Penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan yang Berlaku oleh Dinas Kominfo termasuk kategori **Cukup Efisien** karena dengan penyerapan anggaran 82,72% dapat merealisasikan capaian kinerja 100%.
2. Meningkatnya akses layanan TIK dan Government termasuk kategori **Cukup Efisien** karena dengan realisasi keuangan 88,80 % dan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %

serta indikator kedua realisasi keuangan 88,80 % dengan capaian kinerja sebesar 102,61% .

3. Meningkatnya Pemanfaatan data sektoral termasuk kategori **Cukup Efisien** karena dengan realisasi keuangan sebesar 88,71% dengan capaian kinerja sebesar 90%
4. Meningkatnya keamanan informasi juga termasuk kategori **Efisien** karena dengan realisasi keuangan sebesar 72,81 % dengan capaian kinerja sebesar 113%.

### **Kinerja Lainnya**

Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan selain melaksanakan tugas dan fungsi juga melakukan dukungan terhadap program dan kegiatan lain seperti :

#### 1. Pencapaian SDGs

SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat, oleh karena itu untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tersebut pada tahun 2024 telah dilakukan berupa pengguna internet. Adapun capaian pengguna internet tahun 2024 adalah sebesar 100 % hal ini meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 80 %.

#### 2. Pencapaian pengurangan stunting

Dalam hal mengurangi angka stunting dan pencegahannya Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan telah berperan ikut serta dengan kegiatan melalui publikasi – publikasi cara pencegahan stunting melalui media online, cetak dan spanduk.

#### 3. Pencapaian pengurangan kemiskinan ekstrem

Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Balangan tersebar di 8 (delapan) kecamatan. Kemiskinan ekstrem ini adalah orang-orang yang berada secara ekonomi paling bawah sehingga dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari tidak bisa atau kurang. Dinas Kominfosan pada tahun 2024 telah melakukan beberapa program dan kegiatan dalam upaya pengurangan kemiskinan ekstrem tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Pendampingan pengelolaan data Kemiskinan dilaksanakan dengan melakukan pendampingan pengelola data Dinas Sosial Kabupaten Balangan dalam mendata jumlah jiwa di kemiskinan ekstrem. Kegiatan ini bukan semata-mata dari program dan kegiatan Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan sendiri tetapi adanya peran semua stakeholder yang terlibat.

## Daftar Prestasi SKPD Tingkat Nasional dan Provinsi

Dinas Kominfo Kabupaten Balangan sepanjang tahun 2024 sudah ada mendapatkan penghargaan atau prestasi di tingkat Provinsi.

### PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2024 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Tanggal	Tempat	Penghargaan	Oleh
1	10 Desember 2024	Banjarbaru	Memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten balangan sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Menuju Informatif Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 Kategori Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan Dalam Implementasi UU No.14 2008	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan
2	Desember 2024	Banjarbaru	Memberikan penghargaan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan "Peringkat III Kategori <i>Mitra Humas Pemprov Terbaik</i> pada Apresiasi Media Pemprov Kalsel (AMPK) 2024	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

1. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT LHE DARI INSPEKTORAT

1. Rencana aksi atas LHE AKIP Dinas Kominfo Tahun 2022

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Data		Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Penyelesaian	Link Google Drive
1	Untuk menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja.	Menyusun dan menetapkan pedoman teknis perencanaan kinerja.	1 SOP	Keputusan Kepala Dinas KOMINFOSAN	Februari 2024	DISKOMINFOSAN	Sudah Selesai	<a href="https://drive.google.com/file/d/1hxUJK-mh3VV8zExzcjbdHNiFmNwIvu7c/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1hxUJK-mh3VV8zExzcjbdHNiFmNwIvu7c/view?usp=sharing</a>
2	Terdapat IKU di dalam dokumen Renstra sehingga penerapan IKU berkelanjutan selama 1 periode RPJMD atau Renstra (5 tahun). IKU harus sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai.	IKU dimuat dalam dokumen Renstra dan akan disesuaikan dengan target kinerja yang akan dicapai.	1 Dokumen	Cascading terbaru Sesuai Hasil Evaluasi Menpan RB	Februari 2024	DISKOMINFOSAN	Sudah Selesai	<a href="https://drive.google.com/file/d/1ipPFLrrw5dmP3yXqQL4rtJNzJCO2NA25/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ipPFLrrw5dmP3yXqQL4rtJNzJCO2NA25/view?usp=sharing</a>
3	Dalam menetapkan target minimal pada Renja sesuai dengan Renstra, target provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).	Target minimal pada Renja akan disesuaikan dengan Renstra, target provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).	1 Dokumen	Ranwal Renja Tahun 2024	Desember 2023	DISKOMINFOSAN	Sudah Selesai	<a href="https://drive.google.com/file/d/17_aF5DXliMtJaWCYq6a89jcgRIaRexHQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/17_aF5DXliMtJaWCYq6a89jcgRIaRexHQ/view?usp=sharing</a>
4	Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis pengukuran kinerja.	Menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja.	1 SOP	Keputusan Kepala Dinas KOMINFOSAN	Februari 2024	DISKOMINFOSAN	Sudah Selesai	<a href="https://drive.google.com/file/d/1mPbm4tS2MTJEfp2j07zXjnuyE5jgHdLI/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1mPbm4tS2MTJEfp2j07zXjnuyE5jgHdLI/view?usp=sharing</a>



5	Terdapat penjelasan deskripsi atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja pada Rencana Kerja SKPD.	Penjelasan deskripsi atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja akan dimuat pada Rencana Kerja SKPD.	1 Dokumen	Ranwal Renja Tahun 2024	Desember 2023	DISKOMINFOS AN	Sudah Selesai	<a href="https://drive.google.com/file/d/17_aF5DXliMtJaWCYq6a89jcgrIaRexHQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/17_aF5DXliMtJaWCYq6a89jcgrIaRexHQ/view?usp=sharing</a>
6	Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar usulan penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	Pengukuran kinerja akan menjadi dasar usulan penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.	1 Laporan	Pengukuran Kinerja TW 1 sampai TW 4	Desember 2023 TW 1-TW4	DISKOMINFOS AN	Sudah Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LF1TjREofD85Rwzr7tdT_rQcOz7GowkU?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1LF1TjREofD85Rwzr7tdT_rQcOz7GowkU?usp=sharing</a>
7	Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) menginfokan: a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. b. Perbandingan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) yang disusun akan menginfokan: a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. b. Perbandingan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	1 Dok	Penyusunan LKjIP Tahun 2023	Februari 2024	DISKOMINFOS AN	Sudah Selesai	<a href="https://drive.google.com/file/d/1F8CMTFydJgFP6lQI5VFdYUmNOzwZ4Pum/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1F8CMTFydJgFP6lQI5VFdYUmNOzwZ4Pum/view?usp=sharing</a>
	c. Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/intemasional (Benchmark kinerja)	c. Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/intemasional (Benchmark kinerja)						
8	Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) akan disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkapkan seluruh informasi tentang	1 Dok	Penyusunan LKjIP Tahun 2023	Februari 2024	DISKOMINFOS AN	Sudah Selesai	<a href="https://drive.google.com/file/d/1F8CMTFydJgFP6lQI5VFdYUmNOzwZ4Pum/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1F8CMTFydJgFP6lQI5VFdYUmNOzwZ4Pum/view?usp=sharing</a>



	<p>Diantaranya yang belum termuat dalam LKjIP tahun 2022 yaitu:</p> <p>a. Informasi keuangan/anggaran (target dan realisasi) masing-masing sasaran/indikator kinerja sesuai PK seluruh pegawai (Pejabat Eselon, Fungsional, dan Struktural).</p> <p>b. Informasi secara jelas capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.</p>	<p>pencapaian kinerja, dan akan memuat:</p> <p>a. Informasi keuangan/anggaran (target dan realisasi) masing-masing sasaran/indikator kinerja sesuai PK seluruh pegawai (Pejabat Eselon, Fungsional, dan Struktural).</p> <p>b. Informasi secara jelas capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.</p>						
	<p>c. Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi pada pegawai secara implisit dan eksplisit, seperti: Seluruh target kinerja mencapai 100% sebagai wujud berkomitmen; Adanya efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen; Menurunnya angka pelanggaran atau</p>	<p>c. Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi pada pegawai secara implisit dan eksplisit, seperti: Seluruh target kinerja mencapai 100% sebagai wujud berkomitmen; Adanya efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen; Menurunnya angka</p>						



	hukuman pada pegawai; Selalu memberikan rekomendasi jika terdapat kendala/hambatan sebagai wujud kepedulian dan inovasi/adaptif.	pelanggaran atau hukuman pada pegawai; Selalu memberikan rekomendasi jika terdapat kendala/hambatan sebagai wujud kepedulian dan inovasi/adaptif.						
9	Menyusun/membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diakui/diformalkan. Evaluasi dilakukan dengan dasar target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi, sehingga evaluasi dilaksanakan triwulan.	Menyusun/membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diakui/diformalkan.	1 SOP	Keputusan Kepala Dinas KOMINFOSAN	Februari 2024	DISKOMINFOSAN	sudah selesai	<a href="https://drive.google.com/file/d/1fPTJgFFs1keEFFdIt20u-J0Jq5nIkP04/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1fPTJgFFs1keEFFdIt20u-J0Jq5nIkP04/view?usp=sharing</a>
10	Melaksanakan perbaikan atas faktor hambatan pada monev dilaksanakan dengan adanya peningkatan realisasi target pada monev triwulan berikutnya.	Akan melaksanakan perbaikan atas faktor hambatan pada monev triwulan berikutnya.	1 Laporan	Laporan Monev TW 4	Desember 2023 TW4	DISKOMINFOSAN	sudah selesai	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Qxwl7RfW9LoLEww9TWEtIEPpTAlqQfO_/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Qxwl7RfW9LoLEww9TWEtIEPpTAlqQfO_/view?usp=sharing</a>



11	Menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP Tahun sebelumnya dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya.	Rekomendasi pada LHE AKIP Tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	1 Laporan	Hasil Tindak Lanjut LHE 2022		DISKOMINFOS AN	Telah Ditindak Lanjuti	<a href="https://drive.google.com/file/d/1tYxH1ZQPzWP5c5PPsvCPfMoe0taLoGRW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1tYxH1ZQPzWP5c5PPsvCPfMoe0taLoGRW/view?usp=sharing</a>
12	Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.	Akan mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.	1 Laporan	LKPJ Laporan LPPD	Januari 2024	DISKOMINFOS AN	sudah selesai	<a href="https://docs.google.com/document/d/1fM-t_cHdg87_w8EXCqblZZvvjEpw41Bu/edit?usp=sharing&amp;oid=101102008172212410590&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1fM-t_cHdg87_w8EXCqblZZvvjEpw41Bu/edit?usp=sharing&amp;oid=101102008172212410590&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>

## 2. Rencana Aksi atas LHE AKIP Dinas Kominfosan Tahun 2023

No	Nama SKPD dan Nilai SAKIP	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut				Progres Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan Tindak Lanjut	Link Data Dukung
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
		<b>Perencanaan Kinerja</b>								
	DISKOMINFOS AN ( 73.05 BB)	1 . Agar menyusun Rencana Aksi berdasarkan	Menyusun Rencana Aksi berdasarkan perencanaan				Okt-24	SELESAI		<a href="#">RENCANA AKSI</a>

			perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	aktivitas yang mendukung kinerja.						<a href="#">EKINO 2023</a>
		2	Agar perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Membuat Crosscutting agar perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan				Okt-24	SELESAI	<a href="#">CROSS CUTTING DISKOMINFO SAN</a>
		3	Agar membuat melampirkan data dukung terkait rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala	Membuat dan melampirkan data dukung terkait rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala				Okt-24	SELESAI	<a href="#">MONEV 2023</a>
		<b>Pengukuran Kinerja</b>								



		1	Agar pengukuran kinerja menjadi dasar penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional	Membuat pengukuran kinerja menjadi dasar penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional					Okt-24	SELESAI		<a href="#">SKP PEGAWA I</a>	
		<b>Pelaporan Kinerja</b>											
		1	Agar dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Akan membuat dokumen laporan kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.								Hanya bisa dilaksanakan pada saat penyusunan LKjIP Tahun 2024 pada Awal Tahun 2025 ketika semua kegiatan anggaran Tahun 2024 sudah dilaksanakan	
		2	Agar dokumen laporan kinerja (LKjIP) memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD dengan data realisasi capaian antar	Akan membuat dokumen laporan kinerja (LKjIP) yang memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian								Hanya bisa dilaksanakan pada saat penyusunan LKjIP Tahun 2024 pada Awal Tahun 2025 ketika	



			kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi.	kinerja SKPD dengan data realisasi capaian antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi.						semua kegiatan anggaran Tahun 2024 sudah dilaksanakan	
		3	Agar dokumen LKjIP menyajikan informasi keuangan/anggaran (target dan realisasi) masing-masing sasaran/indikator kinerja sesuai PK seluruh pegawai (Pejabat Eselon, Fungsional, dan Struktural)	Akan membuat dokumen LKjIP yang menyajikan informasi keuangan/anggaran (target dan realisasi) masing-masing sasaran/indikator kinerja sesuai PK seluruh pegawai (Pejabat Eselon, Fungsional, dan Struktural)						Hanya bisa dilaksanakan pada saat penyusunan LKjIP Tahun 2024 pada Awal Tahun 2025 ketika semua kegiatan anggaran Tahun 2024 sudah dilaksanakan	
		4	Agar dokumen LKjIP menginfokan secara jelas capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.	Akan membuat dokumen LKjIP yang menginfokan secara jelas capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.						Hanya bisa dilaksanakan pada saat penyusunan LKjIP Tahun 2024 pada Awal Tahun 2025 ketika semua	



											kegiatan anggaran Tahun 2024 sudah dilaksanakan
<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</b>											
		1	Agar seluruh rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya ditindaklanjuti oleh SKPD dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya	Agar seluruh rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya ditindaklanjuti oleh SKPD dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya							Hanya bisa dilaksanakan pada saat penyusunan LKjIP Tahun 2024 pada Awal Tahun 2025 ketika semua kegiatan anggaran Tahun 2024 sudah dilaksanakan



#### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 – 2026 juga Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 188.45/ /SK/Diskominfo/Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bahwa semua indikator yaitu 5 (lima) indikator dikategorikan Sangat Berhasil. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengelola pagu anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 38,486,700,896 dengan realisasi 86,29 % yang terdiri dari 5 (lima) program yaitu

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** dengan anggaran 11,201,400,044 terealisasi 9,884,890,477 dengan persentase 88.25 % dan capaian kinerjanya 100 %
2. **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** dengan anggaran 14,357,591,600 terealisasi 11,876,707,884 dengan persentase 82,72 % dan capaian kinerjanya 100 %

3. **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** dengan anggaran 12,338,515,352 terealisasi 10,957,072,657 dengan persentase 88,80 % dan capaian kinerjanya 100 %
4. **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** dengan anggaran 394,975,900 terealisasi 350,392,846 persentase 88,71 % dan capaian kinerjanya 100
5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** dengan anggaran 194,218,000 terealisasi 141,408,000 persentase 72.81 dan capaian kinerjanya 100

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKjIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

#### **4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2024, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun Anggaran 2025, yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai secara berkala sehingga terpelihara kompetensi pegawai untuk peningkatan kinerja .
- 2) Meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan tingkat absensi karyawan.
- 3) Motivasi pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian perlu untuk ditingkatkan lagi agar kinerja pegawai secara keseluruhan menjadi lebih baik lagi.

- 4) Memberikan fasilitas kerja seperti pemasangan teknologi (IT), perangkat komputer yang memadai sehingga pekerjaan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.
- 5) Memberikan reward dan punishment terhadap karyawan. Pemberian reward dapat menjadi pemacu semangat bagi karyawan lain untuk dapat bekerja lebih baik sedangkan punishment ditujukan agar karyawan lebih berhati – hati dan disiplin dalam bekerja sehingga akan meminimalisir kesalahan yang sama akan terjadi.
- 6) Bidang Komunikasi dan Informatika akan terus berpacu dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi serta aplikasi – aplikasinya yang telah tersedia untuk mewujudkan “ Masyarakat Informasi dan Komunikatif “

Paringin, 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA STATISTIK DAN  
PERSANDIAN  
KAB. BALANGAN



**MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM**  
**NIP. 19710823 199303 1 005**